



**KAJIAN AKADEMIK GRAND
DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN (GDPK)
*KABUPATEN BANGLI***



**KAJIAN AKADEMIK
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
(GDPK)
KABUPATEN BANGLI**



**OLEH:
TIM PENYUSUN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
DENPASAR
2025**

Halaman Pengesahan

1. KETUA : Dr. Putu Riska Wulandari, S.Si., M.Si

2. ANGGOTA :

1. Astrid Krisdayanthi, M.Si
2. I Made Sugita ,M.H.
3. Ni Made Rai Kristina, S.E., MM.
4. Dr. Drs. I Made Sugata, M.Ag.
5. Dr. I Ketut Gunarta, S.Ag., M.Ag.
6. Dr. Ketut Arta Widana, S.S., M.Par.
7. Dr. I Dewa Gede Rat Dwiyanana Putra, M.Pd.
8. Dr. Ni Luh Ersania, S.Ag., M.Fil.H.
9. I Gede Agus Wahyudi, S.Kom.

3. Tahun Anggaran : 2025

4. Jangka Waktu : 3 (Tiga) bulan (90 hari Kalender)

5. Bidang Kegiatan : Swakelola Tipe II

Mengetahui,
Ketua LP2M



Dr. Drs. I Made Sugata, M.Ag
NIP. 19651231 199403 1 017

Ketua Tim



Dr. Putu Riska Wulandari, S.Si., M.Si
NIP. 19890225 202203 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Bangli. Sebagai rasa terimakasih kami, mewakili Tim Penyusunan Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Bangli, menyampaikan terima kasih kepada BRIDA Kabupaten Bangli yang mempercayakan kepada kami untuk membuat kajian ini beserta menyusun Ranperbupnya. Sebagai tim kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangli yang telah memikirkan pembuatan kajian akademik ini sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin kesejahteraan masyarakat Bangli pada khususnya.

Tim juga menghaturkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang masih belum sempurna di dalam penyusunan Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Bangli dan draft Ranperbup ini. Akhir kata Tim mengucapkan terima kasih dan semoga Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan draft Ranperbup ini dapat berguna bagi Kabupaten Bangli.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Tujuan dan Sasaran.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	5
1.3.2 Ruang Lingkup Materi.....	5
1.4 Pendekatan Pengembangan Gran Design Pembangunan Kependudukan.....	6
1.5 Tenaga Ahli	6
BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.....	9
2.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi Kabupaten Bangli....	9
2.2 Kependudukan Kabupaten Bangli.....	11
2.2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bangli	11
2.2.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Bangli	11
2.2.1.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Umur	18
2.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Bangli.....	22
2.2.2.1 Peningkatan Kualitas Pendidikan	22
2.2.2.2 Aspek Kesehatan	31
2.2.2.3 Pembangunan Keluarga Berkualitas.....	38
2.2.2.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	45
2.2.2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan.....	50
2.2.2.6 Peningkatan Kualitas Aspek Perekonomian.	57
2.2.2.7 Aspek Sarana dan Prasarana.....	60
2.2.2.8 Program Kerja Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan.....	61
BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN SITUASI IDEAL KEPENDUDUKAN	62
3.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Proyeksi Penduduk	62
3.1.1 Analisa Kependudukan Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	65

3.1.2	Analisa <i>Dependency Ratio</i> (DR).....	68
3.1.3	Analisa Angka Kelahiran KAsar/ <i>Crude Birth Rate</i>	68
3.1.4	Analisa Angka Fertilitas Umum/ <i>General Fertility Rate</i> (GFR)	69
3.1.5	Analisa Angka Fertilitas Kelompok Umur/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR).....	70
3.2	Analisa Mortalitas Penduduk	71
3.2.1	Angka Kematian Kasar (Infant Mortality Rate/IMR)	73
3.2.2	Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR) ...	73
3.2.3	Angka Kematian Anak (Child Mortality Rate/ CMR)	74
3.2.4	Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Ratio/MMR)	75
3.3	Peningkatan Kualitas Penduduk.....	75
3.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK).....	76
3.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM)	77
3.3.3	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	78
3.4	Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	79
3.5	Pembangunan Keluarga Berkualitas.....	82
3.6	Penataan Data Informasi Kependudukan Serta Administrasi Kependudukan.....	82
3.7	Situasi Ideal Kependudukan	84

BAB IV VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	86
4.1 Visi	86
4.2 Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah	88

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH.....	92
5.1 Strategi Kebijakan	92

BAB VI ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH	96
6.1 Kebijakan dan Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk	96
6.2 Kebijakan dan Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk.....	99
6.3 Kebijakan dan Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bangli	103
6.4 Kebijakan dan Roadmap Pembangunan Keluarga	104
6.5 Kebijakan dan Roadmap Pembangunan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan	105

BAB VII PENUTUP	114
7.1 Simpulan	114

DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI	

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Peta Wilayah Adminitrasi Kabupaten Bangli	10
2.2	Grafik Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2025.....	11
2.3	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2020-2024	20
2.4	Grafik Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	22
2.5	Grafik Perkembangan APM Kabupaten Bangli	24
2.6	Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Bangli Tahun 2019-2024	26
2.7	Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Bangli.....	28
2.8	Grafik Presentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Bangli Tahun 2019-2024	36
2.9	Grafik Perkembangan Rasio Jaringan Irigrasi daan Persentase Irigrasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bangli.....	47
2.10	Grafik Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Bangli Tahun 2021-2024.....	48
2.11	Grafik Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	49
2.12	Grafik Perkembangan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Bangli....	59
2.13	Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Bangli	60
6.1	Road Map Sasaran Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045.....	98
6.2	Road Map Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045.....	102
6.3	Road Map Sasaran Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045	104
6.4	Road Map Sasaran Pembangunan Keluarga Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045	105
6.5	Road Map Sasaran Kebijakan Pembangunan Sistem Informasi dan Data Administrasi Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045	106

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1	Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bangli.....	9
2.2	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2020-2025	12
2.3	Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024.....	13
2.4	Pertumbuhan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bangli Tahun 2020-2025.....	14
2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2016-2024....	15
2.6	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus	16
2.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2021-2024.....	17
2.8	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2021-2024	18
2.9	Pertumbuhan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bangli Tahun 2020-2025.....	18
2.10	Rasio Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	19
2.11	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024	21
2.12	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi di Kabupaten Bangli	23
2.13	Angka Partisipasi Murni Tahun 2019-2024	23
2.14	Angka Partisipasi Sekolah	25
2.15	Angka Melek Huruf Kabupaten Bangli Tahun 2019-2024	26
2.16	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2020-2024.....	28
2.17	Komponen IPM Kabupaten Bangli Tahun 2020-2024	30
2.18	Persentase Penduduk Bersertifikat Kompetensi	30
2.19	Presentase Pekerja Informal.....	30
2.20	Jumlah Penduduk Berdasarkan Indikator Fertilitas Tahun 2019-2024 Kabupaten Bangli	32
2.21	Jumlah Penduduk Berdasarkan Indikator Mortalitas	33
2.22	Jumlah Balita Bertubuh Pendek dan ASI Eksklusif	34
2.23	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Persen)	36
2.24	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	37
2.25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.....	37
2.26	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	37
2.27	Pernikahan di Kabupaten Bangli.....	40
2.28	Tingkat Perceraian.....	40
2.29	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja.....	41
2.30	Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).....	42
2.31	Garis Kemiskinan.....	42
2.32	Kenaikan Garis Kemiskinan	42

2.33	Gini Ratio.....	43
2.34	Indeks Lansia Berdaya.....	43
2.35	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga).....	44
2.36	Indeks Pelindungan Anak	44
2.37	Anak Terlantar.....	44
2.38	Lanjut Usia Terlantar.....	45
2.39	Data Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bangli.....	46
2.40	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri.....	50
2.41	Data Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik.....	53
2.42	Data Kepemilikan Akta Kelahiran	53
2.43	Kepemilikan Dokumen Kematian	54
2.44	Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak.....	54
2.45	Cakupan Dokumen Akta Perkawinan	55
2.46	Cakupan Dokumen Akta Perceraian	55
2.47	Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak.....	55
2.48	Cakupan Data Akta Pengesahan Anak.....	56
2.49	Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Nama.....	56
2.50	Pendapatan Daerah Regional Bruto per Kapita Kabupaten Bangli (dalam Milyar Rupiah) berdasarkan Lapangan Usaha dan Industri.....	57
2.51	Pendapatan Daerah Regional Bruto per Kapita Kabupaten Bangli.....	58
2.52	Garis Kemiskinan Kabupaten Bangli (Rupiah)	59
2.53	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023	61
3.1	Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045	66
3.2	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	66
3.3	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	67
3.4	Proyeksi <i>Dependency Ratio</i> (DR)	68
3.5	Proyeksi <i>Crude Birth Rate</i> (CBR)	69
3.6	Proyeksi <i>General Fertility Rate</i> (GFR).....	70
3.7	Angka Fertilitas Kelompok Umur (ASFR) Tahun 2020-2024.....	70
3.8	Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020-2024.....	76
3.9	Proyeksi Angka Partisipasi Murni Tahun 2025-2045	76
3.10	Angka Partisipasi Murni	78
3.11	Proyeksi Angka Partisipasi Murni	78
3.12	Indeks Pembangunan Manusia	79
3.13	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia	79
3.14	Pengarahannya Persebaran dan Mobilitas Penduduk	80
3.15	Pembangunan Keluarga Kabupaten Bangli	82
3.16	Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan	83
6.1	Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	97
6.2	Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Bangli	99
6.3	Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah dan nasional tidak dapat lepas dari dinamika dan penduduk yang mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk adalah kumpulan individu yang tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial wilayah tersebut (Todaro & Smith, 2011). Dinamika adalah kekuatan yang memengaruhi struktur dan perilaku organisasi secara terus-menerus (Gibson et al, 2000). Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Pada hakikatnya segala macam aspek perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi serta dinamika kependudukan yang sedang terjadi.

Penduduk adalah penerima manfaat utama dari pembangunan, sehingga tidaklah berlebihan apabila situasi kependudukan mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan. Jumlah, struktur, persebaran, dan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti sosial, ekonomi, budaya, pangan, energi, lingkungan, politik dan keamanan serta berbagai aspek pembangunan lainnya. Aspek-aspek pembangunan tersebut secara resiprokal juga mempunyai pengaruh terhadap situasi kependudukan baik yang sedang terjadi sekarang ataupun di masa depan.

Faktor-faktor yang memengaruhi dinamika penduduk yaitu berbagai unsur yang menyebabkan perubahan jumlah, komposisi, distribusi, dan kualitas penduduk dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu (Weeks, 2011). Faktor yang mempengaruhi situasi kependudukan di Indonesia sedemikian kompleks sehingga dengan struktur kelembagaan yang menanganinya saat ini membutuhkan koordinasi antar sektor dan kementerian atau lembaga. Efektivitas koordinasi pembangunan kependudukan ini harusnya bermula sejak fase perencanaan hingga implementasinya secara sedemikian rupa sehingga akan dapat memperkecil

kesenjangan konsep dengan implementasinya, mengurangi berbagai benturan antar kebijakan dan peraturan, mereduksi konflik kewenangan dan multitafsir implementasi kebijakan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, dan menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang perkembangan berkaitan kependudukan dengan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Karakteristik penanganan persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka suatu Kajian Akademik mengenai Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sangat penting sebagai acuan strategis dalam mengelola pertumbuhan dan distribusi penduduk agar selaras dengan arah pembangunan nasional. GDPK membantu memastikan keterpaduan kebijakan antar-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan (BKKBN, 2020), serta mengoptimalkan bonus demografi dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk. Selain itu, GDPK berperan dalam mendukung pemerataan pembangunan wilayah, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, serta menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) (UNFPA, 2019).

Kajian Akademik Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan. Kajian Akademik Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, yang harus menjadi bagian dari isi

Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan. Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu, visi dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu serta melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variable yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan dibidang kependudukan.

Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosial ekonomi yang unik. Sebagai satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah pesisir, Bangli memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan, khususnya dalam hal pemerataan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah penduduk Bangli terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan dominasi usia produktif yang berpotensi menjadi kekuatan pembangunan apabila dikelola secara tepat. Namun, di sisi lain, ketimpangan persebaran penduduk antarwilayah kecamatan, keterbatasan lahan pertanian, serta meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi juga menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian.

Kabupaten Bangli dikenal dengan potensi pariwisata berbasis alam, budaya, dan spiritual seperti Kintamani, Danau Batur, serta desa-desa wisata adat yang memiliki daya tarik internasional. Potensi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah apabila selaras dengan pengelolaan kependudukan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penataan persebaran penduduk menjadi kebutuhan mendesak agar pembangunan yang berlangsung tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat Bangli.

Penyusunan Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kabupaten Bangli menjadi sangat penting. GDPK akan berperan sebagai pedoman strategis dalam merancang arah pembangunan daerah berbasis kependudukan yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Dengan adanya GDPK, Kabupaten Bangli dapat 1) mengoptimalkan bonus demografi dengan meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; 2) mengurangi ketimpangan persebaran penduduk, khususnya antara wilayah pusat kota dengan desa-desa di daerah perbukitan yang aksesibilitasnya relatif terbatas; 3) menjaga keseimbangan

antara pembangunan dan daya dukung lingkungan, mengingat Bangli merupakan kawasan penyangga ekosistem di Bali, termasuk sumber utama air bagi kabupaten/kota lain di Bali; 4) memperkuat pembangunan keluarga berkualitas, yang menjadi basis lahirnya generasi sehat, produktif, dan berdaya saing; 5) menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat, sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang *evidence-based*.

Keberadaan GDPK di Kabupaten Bangli tidak hanya menjadi amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, tetapi juga menjadi kebutuhan nyata untuk memastikan pembangunan di Bangli selaras dengan visi pembangunan nasional, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

1.2 MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah penyusunan serta pemanfaatan dokumen Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Bangli agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Terwujudnya kesamaan pengertian, penafsiran dan persepsi dalam menyusun Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Bangli.
- 2) Menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan rencana pembangunan bidang kependudukan.
- 3) Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan kependudukan.
- 4) Mendorong terwujudnya Kajian Akademik Grand Design

Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Bangli sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan

c. Sasaran

Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Bangli agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi pekerjaan terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

1.3.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi:

Tahapan penyusunan dokumen Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut:

- Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar
- Penyusunan Rencana Kerja GDPK 5 Pilar
- Penyusunan Kajian Akademis GDPK 5 Pilar
- Penyusunan Proyeksi Penduduk 20 Tahun
- Penyusunan Visi-Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan 20 Tahun
- Harmonisasi dan Penetapan Visi-Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan 20 Tahun.
- Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan 20 Tahun.
- Penyusunan Naskah Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
- Penyepakatan Dokumen Rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar.
- Pengesahan dan Penetapan Dokumen Grand Design

Pembangunan Kependudukan

- Publikasi dan sosialisasi.
- Pelaporan.

1.4 PENDEKATAN PENGEMBANGAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pendekatan pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) melibatkan beberapa hal penting, yaitu fokus pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, penataan persebaran, pembangunan keluarga, dan pengembangan data kependudukan. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, serta memastikan kualitas penduduk yang tinggi

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk:

Ini melibatkan upaya untuk mengatur pertumbuhan penduduk, misalnya melalui program Keluarga Berencana (KB).

2. Peningkatan Kualitas Penduduk:

Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup layak.

3. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk:

Memastikan mobilitas penduduk yang terarah dan seimbang, misalnya dengan meningkatkan infrastruktur dan lapangan kerja di daerah yang kurang berkembang.

4. Pembangunan Keluarga:

Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, dan mampu merencanakan sumber daya keluarga.

5. Pengembangan Data dan Informasi Kependudukan:

Memastikan ketersediaan data kependudukan yang akurat dan terkini untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

1.5 TENAGA AHLI

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Penyedia jasa konsultasi harus menyediakan tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan untuk

menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini dan disetujui oleh PPK

1) Team Leader/Ahli Perencanaan Wilayah

Ketua Tim disyaratkan seorang Sarjana (S-1) Jurusan Ekonomi Pembangunan lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan. Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan selama 5 (lima) bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

2) Ahli Ekonomi

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) Jurusan Ekonomi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan. Dengan tugas utama membantu ketua tim dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 5 (lima) bulan penuh yang berhubungan dengan bidang Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Bangli, sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

3) Ahli Hukum

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) Jurusan Hukum lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan. Dengan tugas utama membantu ketua tim dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 5 (lima) bulan penuh yang berhubungan dengan bidang Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Bangli, sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

4) Ahli Statistik

Tenaga ahli yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) Jurusan Statistik/Ekonomi lulusan universitas negeri atau yang telah disamakan. Dengan tugas utama membantu ketua tim dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 5 (lima) bulan penuh yang berhubungan dengan bidang Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Bangli, sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

5) Surveyor

Surveyor yang disyaratkan adalah seorang Sarjana (S-1) semua jurusan lulusan

universitas negeri atau yang telah disamakan. Dengan tugas utama dalam menyiapkan seluruh kegiatan selama 1 (satu) bulan penuh yang berhubungan dengan bidang Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Kabupaten Bangli.

6) Administrator

Administrator Komputer seorang Sarjana (S-1) semua jurusan yang berpengalaman di bidangnya selama 2 (dua) tahun. Dengan tugas utama dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan selama 4 (empat) bulan penuh sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

2.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi Kabupaten Bangli

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043, Kabupaten Bangli terletak pada 8° 18' 48.027" Lintang Selatan dan 115° 20' 47.299" Bujur Timur. Secara fisik, wilayah bagian selatan Kabupaten Bangli merupakan daerah dataran rendah dan bagian utara merupakan pegunungan. Puncak tertinggi wilayah ini adalah Puncak Penulisan, dimana terdapat Gunung Batur dengan kepondannya. Kabupaten yang sangat terkenal dengan komoditas jeruk Kintamani ini berbatasan langsung dengan lima kabupaten lainnya mulai dari Klungkung, Buleleng, Karangasem, Gianyar, dan Badung.

Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan dan 72 desa/kelurahan yaitu: Kecamatan Susut (9 Desa), Kecamatan Bangli (4 Kelurahan dan 5 Desa), Kecamatan Tembuku (6 Desa) dan Kecamatan Kintamani (48 Desa) dan sebanyak 170 desa adat serta 361 banjar adat. Berikut adalah rincian pembagian administratif masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangli.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Bangli

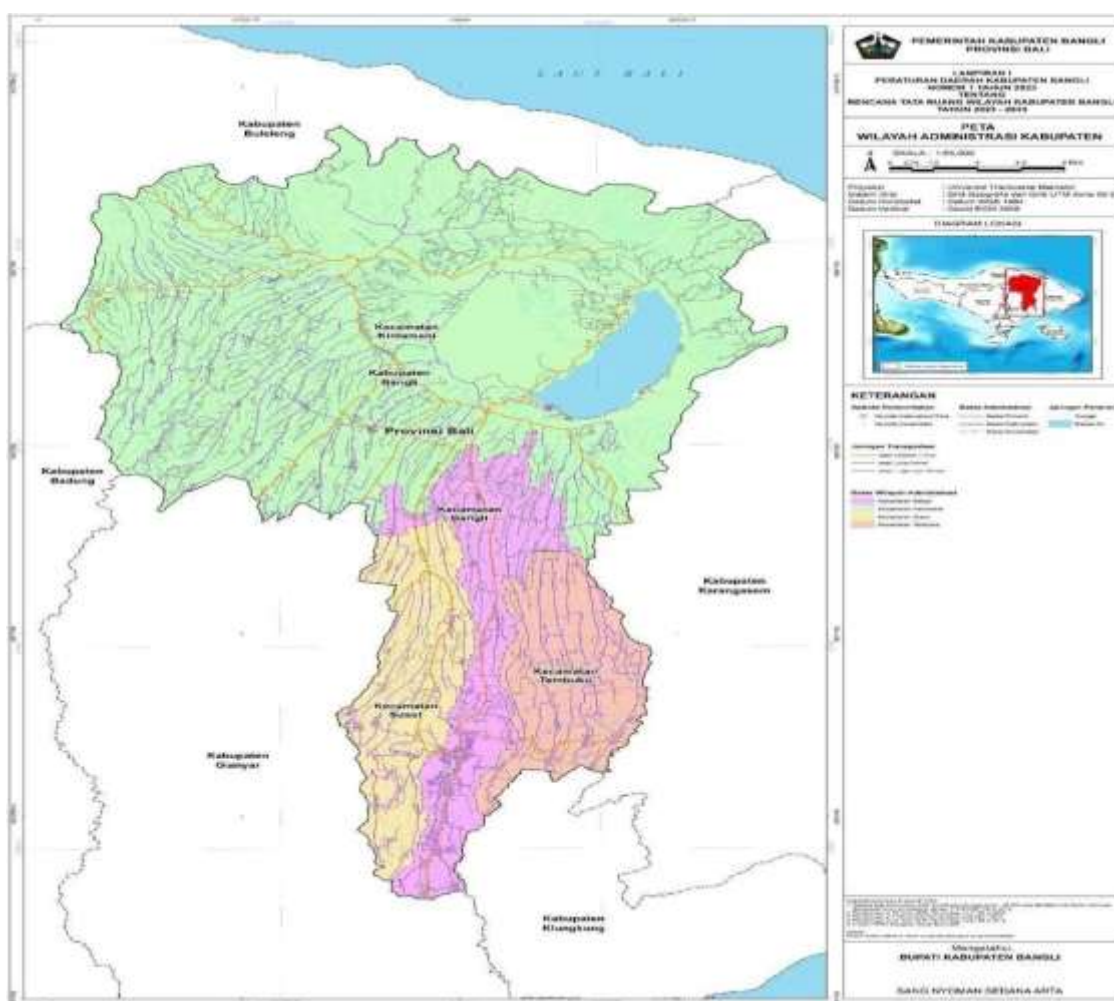
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa Adat	Jumlah Banjar Adat
1	Bangli	5.066,84	9	25	68
2	Susut	5.742,79	9	47	53
3	Tembuku	4.924,84	6	37	62
4	Kintamani	36.973,79	48	61	178
Total		52.676	72	170	361

Sumber: RTRW Kabupaten Bangli Tahun 2023-2043 dan BAPPEDA Kabupaten Bangli, 2025

Dari tabel 2.1 luas wilayah Kabupaten Bangli berdasarkan RTRW Bangli Tahun 2023- 2043 adalah 52.676 Ha. Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli, meliputi Kelurahan Kubu, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan dan Kelurahan Bebalang. Adapun batas-batas dari wilayah Kabupaten Bangli yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
Sebelah Selatan : Kabupaten Klungkung
Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangli



Sumber : RTRW Kabupaten Bangli, 2025

Gambar 2.1 menunjukkan batas-batas wilayah administrasi (batas daerah) Kabupaten Bangli dengan kabupaten sekitarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai berikut:

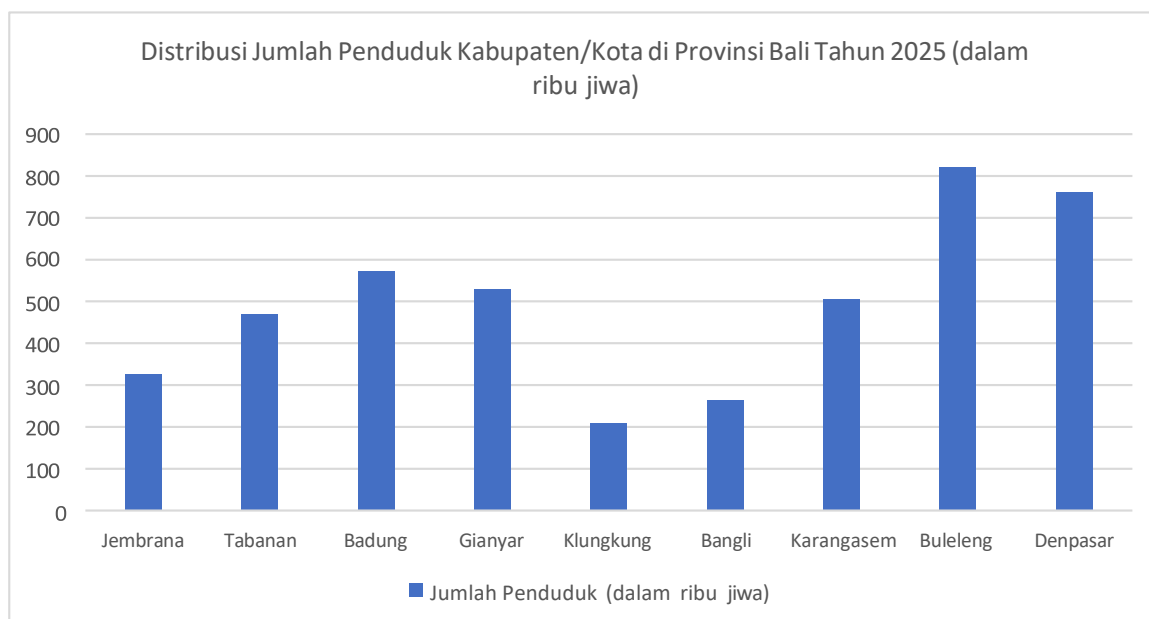
1. Batas sebelah utara dengan Kabupaten Buleleng berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
2. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Karangasem berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Batas Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali
3. Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Klungkung berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali
4. Batas sebelah barat dengan Kabupaten Gianyar berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali
5. Batas sebelah barat dengan Kabupaten Badung berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

2.2 Kependudukan Kabupaten Bangli

2.2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bangli

2.2.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk Kabupaten Bangli

Gambar 2.2 Grafik Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2025



Sumber: Olah Data BPS Provinsi Bali tahun 2025

Apabila dilihat berdasarkan persandingan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali maka jumlah penduduk di Kabupaten Bangli merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Klungkung. Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa terjadi ketidakmerataan distribusi jumlah penduduk di Provinsi Bali. Jadi, meskipun meningkat jumlahnya namun tidak menyebabkan distribusi penduduk ke Kabupaten Bangli menjadi lebih besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya.

Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bangli dan Wilayah Lainnya di Provinsi Bali Tahun 2020-2025

No	Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Jembrana	317,1	319,0	321,2	323,46	325,63	327,71
2	Kab. Tabanan	461,6	463,0	464,5	466,13	467,67	469,13
3	Kab. Badung	548,2	553,0	558,1	563,33	568,55	573,7
4	Kab. Gianyar	515,3	518,0	520,9	524,03	527,12	530,12
5	Kab. Klungkung	206,9	207,0	208,1	208,71	209,31	209,87
6	Kab. Bangli	258,7	259,0	260,4	261,38	262,3	263,17
7	Kab. Karangasem	492,4	495,0	497,5	499,95	502,33	504,61
8	Kab. Buleleng	791,8	796,0	802,8	808,87	814,79	820,48
9	Kota Denpasar	725,3	733,0	741,0	748,4	755,57	762,48
	Provinsi Bali	4.317,4	4.343,5	4.374,3	4.404,26	4.433,26	4.461,27

Sumber: Olah Data BPS Provinsi Bali tahun 2025

Berdasarkan data Proyeksi jumlah penduduk oleh BPS Provinsi Bali yang ditunjukkan dalam Tabel 2.2, pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Bangli adalah 263,17 ribu jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dimana saat itu jumlah penduduk di Kabupaten Bangli adalah 258,7 ribu jiwa.

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km Persegi (Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
	Laki	Perempuan	Total				
Jembrana	163,07	162,56	325,6	0,67	7,35	383	100,3
Tabanan	232,82	234,85	467,7	0,33	10,55	551	99,1
Badung	285	283,54	568,5	0,92	12,82	1426	100,5
Gianyar	262,38	264,74	527,1	0,57	11,89	1447	99,1
Klungkung	104,99	104,32	209,3	0,29	4,72	667	100,6
Bangli	131,95	130,35	262,3	0,34	5,92	498	101,2
Karangasem	251,6	250,73	502,3	0,5	11,33	599	100,3
Buleleng	408,95	405,83	814,8	0,72	18,38	616	100,8
Denpasar	381,68	373,88	755,6	1,03	17,04	6003	102,1
Provinsi Bali	2.222,44	2.210,82	4.433,30	0,66	100	739	100,5

Sumber : BPS Provinsi Bali

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh Tabel 2.3, Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangli adalah 498 Jiwa/Km² pada Tahun 2024. Apabila dilihat berdasarkan konteks kewilayahan yang lebih luas, kepadatan penduduk Kabupaten Bangli pada tahun 2024 merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Jembrana diantara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali. Data ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bangli bukan merupakan wilayah yang menarik untuk menjadi lokasi bermukim bagi masyarakat di Provinsi Bali. Wilayah Bali Selatan yaitu Badung dan Denpasar masih menjadi primadona migrasi penduduk antar kabupaten/kota di Bali.

Menurut data dari BPS Provinsi Bali sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 2.3 sebelumnya, Rasio Jenis Kelamin penduduk di Kabupaten Bangli pada tahun 2024 adalah 101,2 dimana angka ini lebih besar daripada milik Provinsi Bali (100,5). Apabila disandingkan dengan data kabupaten/kota lainnya maka Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bangli merupakan tertinggi kedua setelah Kota Denpasar (102,1). Semakin tinggi Rasio Jenis Kelamin maka semakin tinggi perbedaan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan di wilayah tersebut. Artinya ketimpangan komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Bangli merupakan tertinggi kedua di Bali meskipun ketimpangan ini tidak berdampak signifikan di dunia nyata.

Tabel 2.4 Pertumbuhan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bangli Tahun 2020-2025

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1	2020	130,06	128,12
2	2021	130,61	128,73
3	2022	131,09	129,30
4	2023	131,55	129,84
5	2024	131,95*	130,35*
6	2025	132,33*	130,84*

Sumber: BPS Kabupaten Bangli

** Hasil Proyeksi Penduduk berdasarkan SPLF2020 2020–2025 (Pertengahan tahun/Juni), BPS Provinsi*

Berdasarkan tabel 2.4 pertumbuhan rasio jenis kelamin Kabupaten Bangli, terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 130,06 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 128,12 ribu jiwa. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki menjadi 130,61 ribu jiwa dan perempuan 128,73 ribu jiwa. Pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 131,09 ribu jiwa dan perempuan 129,30 ribu jiwa.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 131,55 ribu jiwa, sementara perempuan mencapai 129,84 ribu jiwa. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki diperkirakan akan mencapai 131,95 ribu jiwa dan perempuan 130,35 ribu jiwa serta pada tahun 2025 proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bangli diperkirakan 132,33 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 130,84 ribu jiwa penduduk perempuan. Data ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten pada kedua jenis kelamin, dengan laju pertumbuhan yang relatif seimbang.

Berdasarkan Data Buku agregat kependudukan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2023 Semester II dan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bangli menunjukkan fluktuasi selama periode tahun 2016 hingga 2023. Pada tahun 2016 jumlah penduduk tercatat sebanyak 263.890 jiwa dan sempat mengalami peningkatan hingga mencapai 267.556 jiwa pada tahun 2019 dengan laju pertumbuhan rata-rata yang relatif rendah, berkisar antara 0,20% hingga 0,62% per tahun. Namun, sejak tahun 2020 jumlah penduduk mulai mengalami penurunan, terutama pada tahun 2021 yang tercatat mengalami laju pertumbuhan negatif sebesar -3,74%, diduga akibat dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk, baik dari sisi angka kelahiran, kematian, maupun mobilitas penduduk.

Setelah tahun 2021, jumlah penduduk kembali menunjukkan tren positif dengan laju pertumbuhan yang bervariasi, meskipun tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebesar 258.146 jiwa dan diproyeksikan kembali meningkat menjadi 259.392 jiwa pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 0,48% per tahun. Secara umum, dinamika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli dalam periode ini menggambarkan adanya tekanan eksternal yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk, serta pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap indikator demografi sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2016 – 2024

No	Tahun Sensus	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	2016	263.890	
2	2017	265.380	0,56
3	2018	267.031	0,62
4	2019	267.556	0,20
5	2020	265.844	-0,64
6	2021	255.911	-3,74
7	2022	256.631	0,28
8	2023	258.146	0,58
9	2024	259.392	0,48

Sumber: Olahan Data Buku Agregat Kependudukan Kabupaten Bangli Tahun 2016 – 2023 Semester II dan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, 2024

Tabel 2.5 menunjukkan pada tahun 2016 – 2018, Laju pertumbuhan penduduk konsisten positif dari 0,56% hingga 0,62% menunjukkan jumlah kelahiran dan/atau migrasi masuk lebih tinggi daripada kematian dan migrasi keluar. Pada tahun 2019 pertumbuhan mulai melambat ke 0,20%, yang bisa mengindikasikan penurunan angka kelahiran atau peningkatan migrasi keluar. Laju pertumbuhan pada tahun 2020 menjadi -0,64%, berarti jumlah penduduk menurun sekitar 1.712 jiwa dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan migrasi keluar yang cukup tinggi dan kematian lebih tinggi dari kelahiran dimana pada tahun ini terjadi pandemi COVID-19. Tahun 2021 penurunan semakin tajam ke -3,74%, setara kehilangan ± 9.933 jiwa. Angka ini signifikan dan bisa terkait puncak pandemi, kerugian ekonomi, dan migrasi keluar besar-besaran. Pertumbuhan kembali positif 0,28% di Tahun 2022, meskipun belum setinggi pra- 2020. Pertumbuhan membaik di Tahun 2023 menjadi 0,58% hal ini menunjukkan mulai pulihnya angka kelahiran atau meningkatnya migrasi masuk. Tahun 2024 pertumbuhan sedikit melambat ke 0,48%, tapi tetap positif, mengindikasikan stabilisasi demografi.

Tabel 2.6 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus

Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Penduduk Menurut Periode Sensus (%)					
	1961 - 1971	1971 – 1980	1980 – 1990	1990 – 2000	2000 – 2010	2010 - 2020
Jembrana	2,91	1,77	0,60	0,63	1,22	1,88
Tabanan	1,85	0,44	0,19	0,73	1,13	0,90
Badung	2,60	2,34	1,23	2,33	4,62	0,09
Gianyar	1,58	1,20	0,96	1,56	1,80	0,90
Klungkung	0,87	0,66	0,12	0,31	0,94	1,89
Bangli	1,11	1,56	0,88	0,94	1,06	1,79
Karangasem	0,23	1,63	0,89	0,49	0,96	2,12
Buleleng	2,27	1,90	1,04	0,33	1,12	2,33
Denpasar	-	-	4,05	3,20	4,01	- 0,81
Provinsi Bali	1,77	1,54	1,18	1,26	2,14	1,01

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun, 2023

Tabel 2.6 data kompilasi hasil sensus dari BPS Provinsi Bali, Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi. Pada Sensus tahun 2020 yang lalu diketahui pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli adalah 1,79% dimana

angka ini meningkat dari hasil sensus periode sebelumnya yang mencatat angka pertumbuhan 1,06%. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli sesuai hasil sensus tahun 2020 tersebut merupakan yang tertinggi selama sensus penduduk pernah dilaksanakan di Kabupaten Bangli. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangli sempat mengalami perlambatan pada sensus tahun 1980-1990 dimana saat itu tercatat angkanya adalah 0,88% sedangkan pada periode sensus sebelumnya tercatat sebesar 1,56% atau menurun hampir separuhnya.

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali seperti tampak pada Tabel 2.6 terdapat pola pertumbuhan penduduk yang dapat mengindikasikan bagaimana distribusi pembangunan di Bali akan berlangsung. Wilayah Bali selatan seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan mengalami pertumbuhan penduduk paling rendah diantara wilayah lainnya di Bali (dibawah 1% bahkan Kota Denpasar mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 0,81% tiap tahun). Ini mengindikasikan wilayah-wilayah tersebut sedang memasuki fase jenuh akibat ruang-ruang untuk pembangunan semakin berkurang yang berimplikasi pada harga-harga yang meningkat namun disisi lainnya daya beli masyarakat tidak turut meningkat. Pada sisi lainnya wilayah kabupaten lain di luar Bali Selatan seperti Kabupaten Karangasem, Buleleng, Klungkung, Jembrana, dan Bangli memiliki pertumbuhan penduduk di atas 1,7%. Terpaut sangat jauh dari Bali Selatan.

Kabupaten Bangli memiliki jumlah penduduk 259.392 jiwa berdasarkan Data Agregat Semester I Tahun 2024, mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli Tahun 2021 – 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk			
	2021	2022	2023	2024
Susut	48,684	49,123	49,425	49,658
Bangli	53,753	54,077	54,176	54,283
Tembuku	43,379	43,341	43,600	43,736
Kintamani	109,074	109,370	110,945	111,715
Kab. Bangli	254,890	255,911	258,146	259,392

(Sumber : BPS Kab. Bangli, 2025)

Berdasarkan tabel 2.7 pertumbuhan positif terjadi di hampir semua kecamatan, menunjukkan kondisi demografi yang relatif stabil. Kintamani menjadi penyumbang terbesar jumlah penduduk (lebih dari 40% total kabupaten), sehingga kecamatan ini berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Bangli dan Susut tumbuh lebih lambat, sedangkan Tembuku sempat stagnan, yang bisa terkait dengan faktor migrasi, urbanisasi, atau dinamika ekonomi setempat.

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangli
Tahun 2021 – 2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk			
	2021	2022	2023	2024
Susut	965.76	974.47	980.46	985.08
Bangli	955.44	961.20	962.96	964.86
Tembuku	854.09	853.34	858.44	861.11
Kintamani	282.46	283.22	287.30	289.30
Kab. Bangli	469.27	471.15	475.27	477.56

(Sumber : Sumber : BPS Kab. Bangli, 2025)

Tabel 2.8 berdasarkan data Data Agregat Semester I Tahun 2024 pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, kecamatan terpadat adalah Kecamatan Susut dengan kepadatan mencapai 985,08 Jiwa/Km².

2.2.1.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Umur

Penduduk Kabupaten Bangli dapat diperinci jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kabupaten Bangli didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Berikut adalah gambar penduduk Kabupaten Bangli menurut jenis kelamin:

Tabel 2.9 Pertumbuhan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bangli Tahun 2020-2025

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1	2020	130,06	128,12
2	2021	130,61	128,73
3	2022	131,09	129,30
4	2023	131,55	129,84
5	2024	131,95*	130,35*
6	2025	132,33*	130,84*

(Sumber: BPS Kabupaten Bangli, 2025)

* Hasil Proyeksi Penduduk berdasarkan SPLF2020 2020–2035
(Pertengahan tahun/Juni), BPS Provinsi

Berdasarkan data pertumbuhan rasio jenis kelamin Kabupaten Bangli pada Tabel 2.9, terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dari tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 130,06 ribu jiwa dan perempuan sebanyak 128,12 ribu jiwa. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki menjadi 130,61 ribu jiwa dan perempuan 128,73 ribu jiwa. Pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 131,09 ribu jiwa dan perempuan 129,30 ribu jiwa.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 131,55 ribu jiwa, sementara perempuan mencapai 129,84 ribu jiwa. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki diperkirakan akan mencapai 131,95 ribu jiwa dan perempuan 130,35 ribu jiwa serta pada tahun 2025 proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bangli diperkirakan 132,33 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 130,84 ribu jiwa penduduk perempuan. Data ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten pada kedua jenis kelamin, dengan laju pertumbuhan yang relatif seimbang.

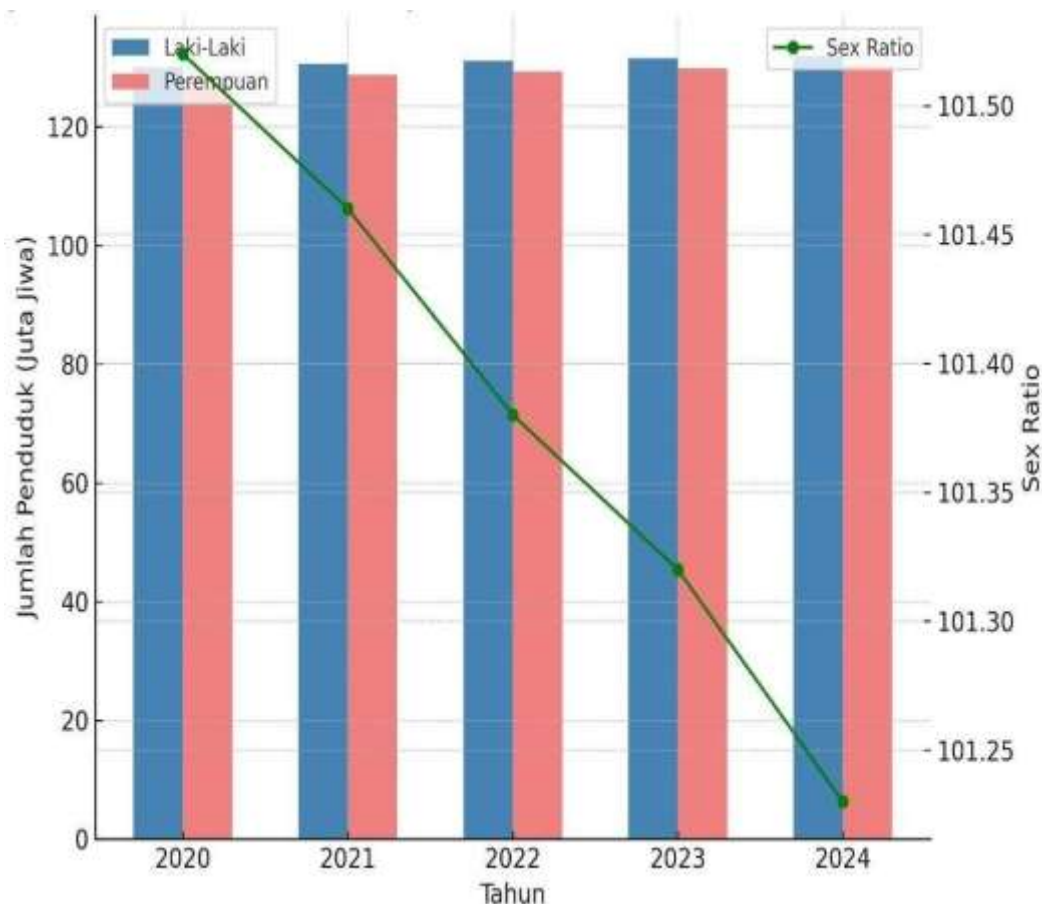
Tabel 2.10 Rasio Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	130,06	130,61	131,09	131,55	131,95
Perempuan	128,12	128,73	129,30	129,84	130,35
Jumlah	258,18	259,34	260,38	261,38	262,30
Sex Ratio ((jumlah laki-laki / jumlah perempuan) * 100)	101,52	101,46	101,38	101,32	101,23

(Sumber : BPS Kabupaten Bangli, 2025)

Gambar 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2020-2024



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 2.10 dan Gambar 2.3 menunjukkan jumlah laki-laki untuk setiap 100 perempuan, dari data di atas, tampak bahwa rasio sedikit menurun dari 101,51 (2020) ke 101,23 (2024). Artinya, jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dari perempuan di semua tahun tersebut, namun selisihnya makin kecil setiap tahun. Sedangkan untuk struktur umur, Kabupaten Bangli pada tahun 2024, jumlah tertinggi pada umur 11-14 tahun dengan jumlah 20.920 jiwa. Penurunan ini walaupun kecil sebesar 0,29 poin konsisten tiap tahun, menandakan keseimbangan gender semakin mendekati 1:1. Berikut jumlah penduduk berdasarkan struktur umur di Kabupaten Bangli.

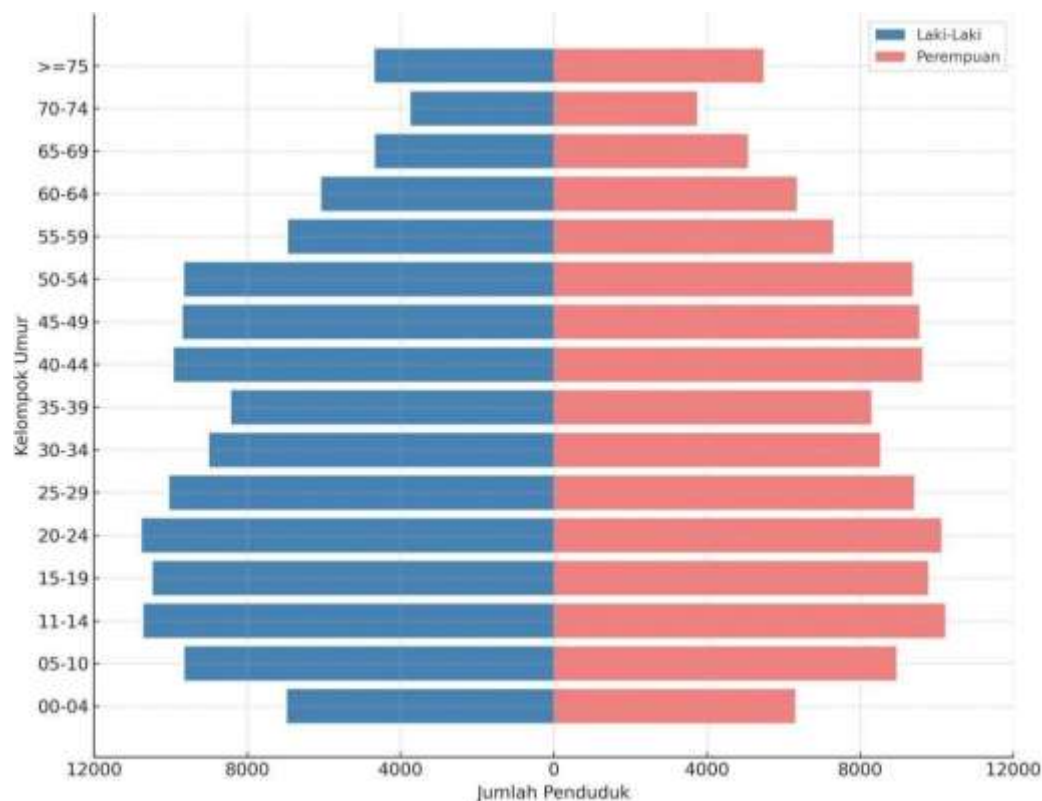
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
00-04	6,961	6,308	13,269
05-10	9,641	8,942	18,583
11-14	10,706	10,214	20,920
15-19	10,467	9,779	20,246
20-24	10,759	10,116	20,875
25-29	10,035	9,404	19,439
30-34	8,997	8,521	17,518
35-39	8,427	8,291	16,718
40-44	9,913	9,617	19,530
45-49	9,690	9,547	19,237
50-54	9,652	9,366	19,018
55-59	6,939	7,295	14,234
60-64	6,074	6,343	12,417
65-69	4,669	5,074	9,743
70-74	3,736	3,746	7,482
≥ 75	4,682	5,481	10,163
Jumlah	131,348	128,044	259,392

(Sumber : Buku Data Agregat Semester I Tahun 2024, Semester II Tahun 2021-2023)

Menarik untuk dicermati pada Tabel 2.11 dan Gambar 2.3 bahwa umur 65+ semakin sedikit dibandingkan dengan kelompok umur 60-64. Ini menunjukkan bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Bangli semakin panjang. Dari piramida tersebut juga dapat disimpulkan bahwa jumlah kelahiran dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu mengalami kenaikan. Untuk mempertahankan jumlah kelahiran yang tidak begitu signifikan kenaikannya tersebut dapat dilakukan dengan program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana Nasional dalam mengendalikan tingkat kelahiran melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu dilakukan pula peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, termasuk dalam rangka pendewasaan usia perkawinan pertama melalui peningkatan pemahaman dan peningkatan derajat kesehatan reproduksi remaja.

Gambar 2.4
Grafik Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Program ketahanan keluarga dengan pembinaan dan pelatihan kepada kader Bina Ketahanan Keluarga yaitu kader-kader Bina Ketahanan Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia dan Peningkatan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan Keluarga Berencana. Agar jumlah penduduk dapat terkendali dan terencana dengan baik, maka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) perlu dilakukan. Banyak dokter spesialis kandungan menyebutkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi tidak saja dapat mengendalikan kelahiran tetapi juga memiliki berbagai manfaat lainnya. Manfaat tersebut antara lain dapat menjaga kesehatan reproduksi, sehingga meminimalisis resiko penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi seperti kanker payudara, kanker serviks dan sebagainya.

Tabel 2.12 Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi di Kabupaten Bangli

	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi di Kabupaten Bangli	86,1	64,2	64,76	61,90	69,9

Sumber: RPJMD Bangli, 2025

Tabel 2.12 tahun 2020 menjadi capaian terbaik dengan cakupan KB terpenuhi mencapai 86,1%. Setelah itu terjadi penurunan signifikan pada 2021–2023, yang mungkin dipengaruhi oleh dampak pandemi (akses layanan KB terbatas) dan perubahan perilaku atau preferensi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi. Pada 2024 menunjukkan tren pemulihan (69,9%), meski masih jauh di bawah capaian 2020.

2.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Bangli

2.2.2.1 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pada aspek pendidikan, indikator angka partisipasi sekolah menjadi salah satu ukuran yang penting. Angka partisipasi sekolah (*net enrollment rate*) sendiri merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk, terutama usia muda yang masih sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dengan demikian, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

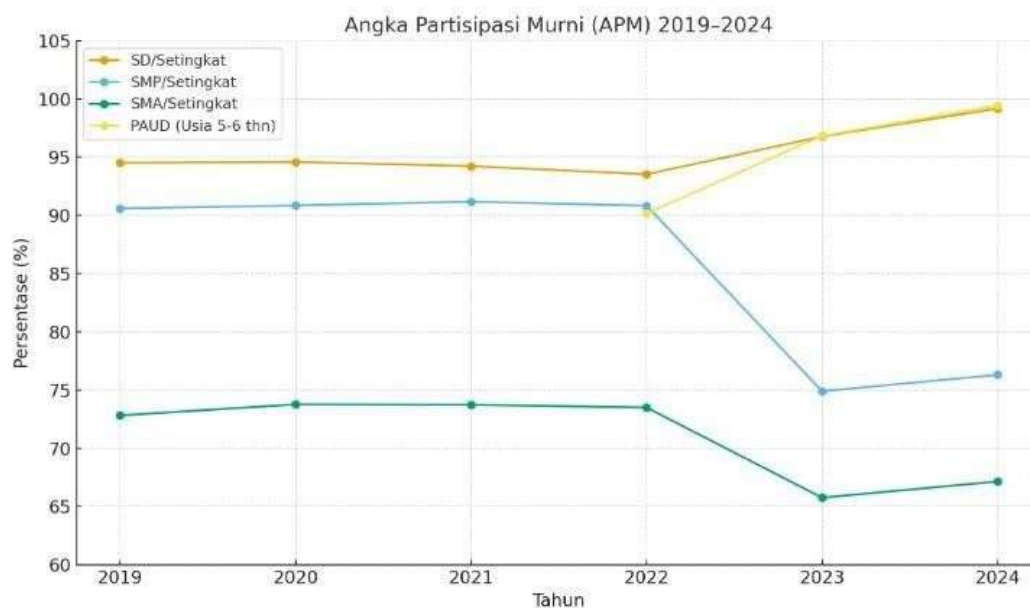
Tabel 2.13 Angka Partisipasi Murni Tahun 2019 – 2024

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	N/A	N/A	N/A	90,17	96,84	99,44
2	SD/Setingkat	94.51	94.59	94.23	93.53	96.77	99.18
3	SMP/Setingkat	90.60	90.85	91.18	90.83	74.90	76.31
4	SMA/Setingkat	72.82	73.77	73.74	73.5	65.76	67.15

(Sumber: RPJMD Bangli 2025, BPS Kabupaten Bangli, 2025)

Tabel 2.13 Angka partisipasi Murni (APM) atau *net enrollment rate* *dijenjang*, pada jenjang PAUD data hanya tersedia mulai tahun 2022. Pada tahun 2022 persentase 90,17% sampai tahun 2023 meningkat ke 96,84% dan pada tahun 2024 sebesar 99,44%, artinya hampir semua anak usia dini sudah mengikuti PAUD, tren sangat positif. Pada jenjang pendidikan SD menunjukkan perkembangan yang dinamis. *Net enrollment rate* pada jenjang SD/setingkat cukup fluktuatif dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. sejalan dengan jenjang SD, angka partisipasi murni jenjang SMP/setingkat masih memerlukan perbaikan. Dilihat dari angka partisipasi murni jenjang SMP/setingkat dan SMA/setingkat yang masih memerlukan dorongan untuk mencapai angka 100 persen. Angka partisipasi murni jenjang SMP/setingkat yang sebesar 74,90. angka partisipasi murni jenjang SMA/setingkat tertinggi pada tahun 2020 sebesar 73,77 persen dan terendah di tahun 2023 sebesar 65,76.

Gambar 2. 5 Grafik Perkembangan APM Kabupaten Bangli



Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 2.5 pada tingkat PAUD dan SD menunjukkan tren meningkat hingga hampir universal, tetapi transisi ke jenjang lebih tinggi masih menjadi tantangan. Penurunan drastis APM SMP dan SMA pada 2023 perlu dianalisis penyebabnya seperti karena faktor ekonomi pasca pandemi, pernikahan dini, atau migrasi kerja. Peningkatan 2024 menunjukkan upaya pemulihan mulai berdampak, namun butuh intervensi kebijakan untuk mengembalikan angka ke level sebelum 2023. Gambar 2.5 menggambarkan grafik Partisipasi Murni Kabupaten Bangli tahun 2019–2024 berdasarkan jenjang pendidikan:

1. SD/Setingkat menunjukkan tren meningkat signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2024.
2. SMP/Setingkat sempat menurun drastis pada 2023, meskipun mulai naik kembali di 2024.
3. SMA/Setingkat mengalami penurunan sejak 2022, tapi mulai stabil kembali di 2024.

Angka melek huruf menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa baca/tulis disuatu daerah dengan seluruh jumlah penduduk usia 15 tahun di daerah tersebut. Angka melek huruf merupakan pencapaian indikator dasar dari suatu daerah dalam memperluas ilmu pengetahuan, karena dengan membaca berarti penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Dengan memiliki pengetahuan, maka penduduk mudah mengerjakan sesuatu termasuk dalam mencari pekerjaan. Dengan bekerja, maka kondisi ekonominya dapat meningkat dan tingkat kesejahteraannya juga semakin meningkat. Dengan tingkat kesejahteraan yang semakin meningkat diharapkan tingkat kemiskinan semakin berkurang.

Tabel 2.14 Angka Partisipasi Sekolah

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah	N/A	90,35	92,35	92,36	89,61	N/A

Sumber: RPJMP, 2025

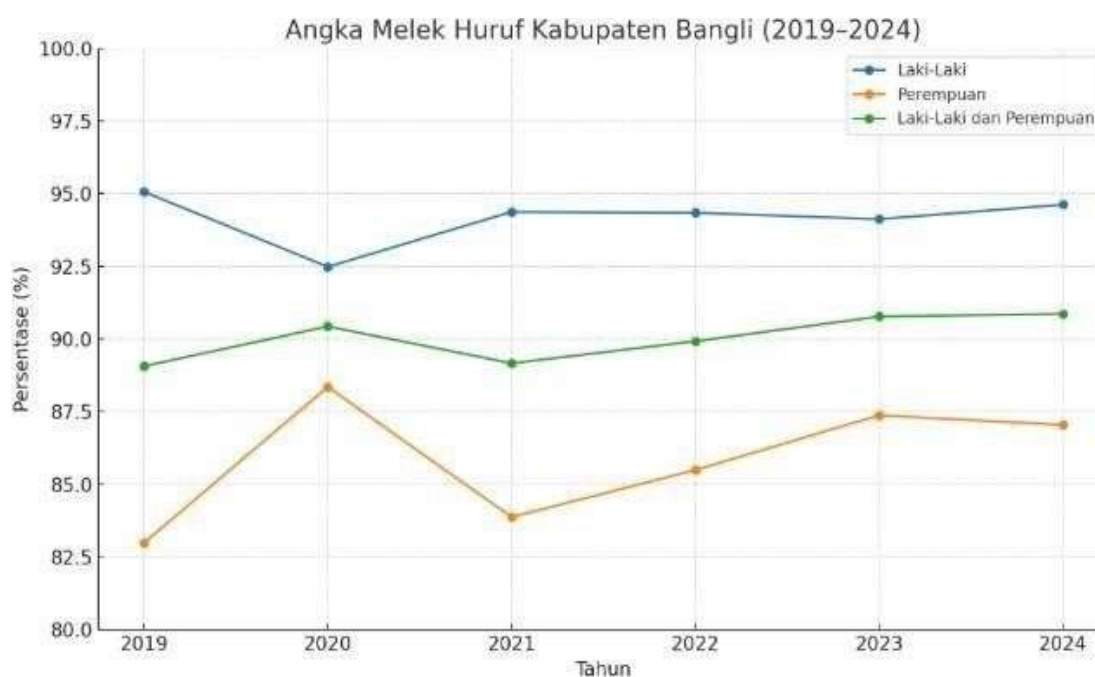
Tabel 2.14 Puncak APS terjadi pada 2021–2022, sekitar 92%. Terjadi penurunan di 2023, yang selaras dengan tren penurunan APM SMP & SMA yang sudah kita lihat sebelumnya.

Tabel 2.15 Angka Melek Huruf Kabupaten Bangli Tahun 2019 – 2024

Angka Melek Huruf	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	95.06	92.48	94.37	94.34	94.12	94.62
Perempuan	82.98	88.35	83.87	85.49	87.37	87.04
Laki-Laki dan Perempuan	89.06	90.43	89.16	89.92	90.77	90.86

(Sumber: BPS Kabupaten Bangli, 2025)

Tabel 2.15 Angka Melek Huruf total untuk laki-laki dan perempuan berada di kisaran 89–91% selama periode. Kenaikan kecil terlihat dari 2021 ke 2023, lalu stabil pada 2024. Perbaikan angka melek huruf lebih dipengaruhi oleh peningkatan literasi perempuan, karena literasi laki-laki relatif konstan. Peningkatan literasi perempuan adalah kunci untuk menaikkan rata-rata kabupaten secara keseluruhan. Perlu program pengentasan kesenjangan literasi gender, seperti program keaksaraan fungsional khusus perempuan dewasa, penyediaan akses pendidikan setara di wilayah pedesaan. Kampanye pentingnya pendidikan bagi perempuan.

Gambar 2.6 Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Bangli Tahun 2019-2024

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Gambar 2.6 menunjukkan grafik Angka Melek Huruf di Kabupaten Bangli untuk tahun 2019 hingga 2024, yang menampilkan tren berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki selalu memiliki angka melek huruf lebih tinggi daripada perempuan sepanjang 2019–2024, dengan selisih rata-rata sekitar 6–8 poin persentase. Kesenjangan gender dalam literasi tetap ada, meskipun ada sedikit perbaikan pada beberapa tahun. Tahun 2019-2020 trend laki-laki turun dari 95% ke sekitar 92,5% (penurunan $\pm 2,5$ poin). Tahun 2021 trend laki-laki naik signifikan kembali mendekati 94%. Tahun 2021-2024 trend laki-laki stabil di kisaran 94–94,5%, menunjukkan kondisi literasi laki-laki relatif terjaga. Sedangkan pada trend perempuan tahun 2019-2020 meningkat tajam dari $\pm 83\%$ menjadi $\pm 88\%$ kemungkinan efek program literasi atau peningkatan akses pendidikan. Tahun 2020-2021 Turun kembali ke $\pm 84\%$. Tahun 2021-2023 Naik konsisten hingga $\pm 87,5\%$. Tahun 2023 sedikit turun ke $\pm 87,2\%$, menunjukkan perlunya upaya khusus mempertahankan tren positif.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi indikator yang penting dalam pembangunan daerah. Kabupaten Bangli merupakan daerah dengan pembangunan industri khususnya pariwisata dan pertanian yang cukup tinggi sehingga harus didukung dengan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu yang dapat menggambarkan hasil dari pembangunan sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan manusia dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

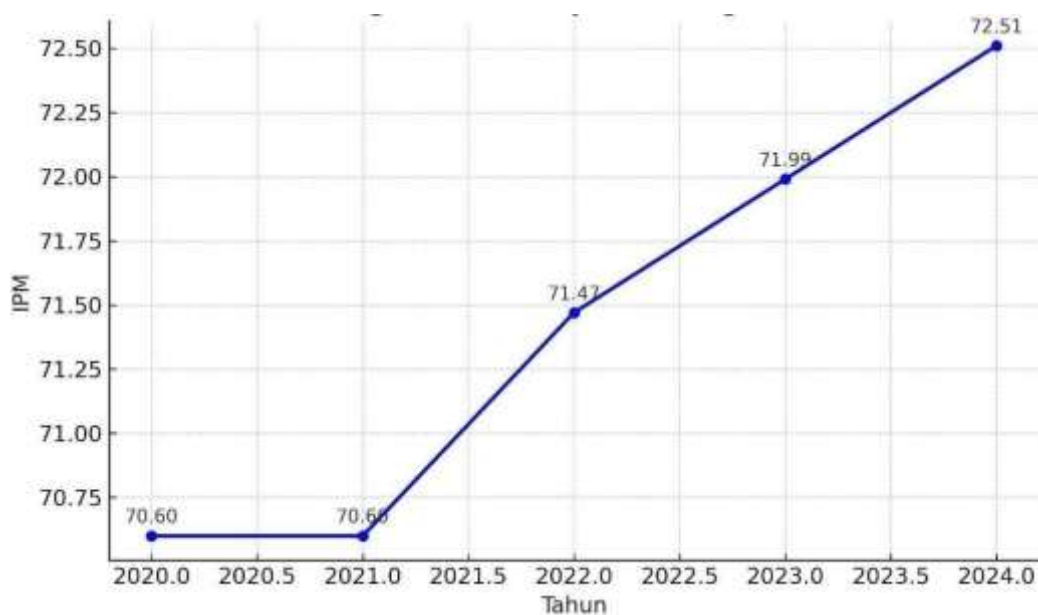
Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Kabupaten	IPM [UHH LF SP2020]				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	73.18	73.57	74.38	74.80	75.32
Tabanan	76.67	76.95	77.22	77.87	78.83
Badung	81.60	81.84	82.13	83.00	83.73
Gianyar	77.88	78.21	78.87	79.69	80.23
Klungkung	72.97	72.98	73.77	74.18	75.15
Bangli	70,60	70.60	71.47	71.99	72.51
Karangasem	68.50	68.58	69.48	70.09	70.91
Buleleng	73.60	73.60	74.48	74.87	75.35
Kota Denpasar	83.95	84.04	84.39	84.68	85.11
BALI	76.52	76.69	77.40	78.01	78.63

(Sumber: BPS Kabupaten Bangli, 2025)

Tabel 2.16 IPM Bangli mengalami kenaikan bertahap dari tahun ke tahun sejak 2021, dengan peningkatan stabil dan positif setiap tahunnya. Setelah stagnan pada 2020 dan 2021 di angka 70,60, terjadi kenaikan konsisten:

- 2022: +0,87 poin
- 2023: +0,52 poin
- 2024: +0,52 poin

Gambar 2.7 Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Bangli

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli pada Gambar 2.7 dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2021, menunjukkan perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. IPM dikembangkan oleh PBB dan digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan manusia dengan memperhitungkan beberapa faktor kunci, seperti harapan hidup, tingkat pendidikan dan standar hidup. IPM menggabungkan beberapa indikator kunci untuk menciptakan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan manusia daripada hanya menggunakan indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Indikator utama yang digunakan dalam perhitungan IPM adalah:

1) Harapan Hidup

IPM memperhitungkan harapan hidup sebagai ukuran kesehatan masyarakat. Harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan gaya hidup yang sehat.

2) Tingkat Pendidikan

IPM juga mempertimbangkan tingkat pendidikan dengan melihat rata – rata tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk dan tingkat partisipasi sekolah. Pendidikan yang baik dapat membuka peluang ekonomi yang lebih baik bagi individu dan masyarakat.

3) Standar Hidup

IPM menggunakan PDB per kapita sebagai indikator standar hidup. PDB per kapita menggambarkan tingkat kemakmuran relatif suatu negara dan dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik distribusi kekayaan diantara penduduknya.

Dengan menggabungkan faktor – faktor tersebut, IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah daripada hanya menggunakan ukuran ekonomi saja. Hal ini memungkinkan pembangunan daerah agar memperhatikan kesejahteraan secara keseluruhan.

Tabel 2.17 Komponen IPM Kabupaten Bangli Tahun 2020 – 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup	73.28	73.36	73.67	73.98	74.23
Rata-rata Lamanya Sekolah	7.17	7.18	7.47	7.57	7.58
Harapan Lama Bersekolah	12.34	12.35	12.49	12.52	12.53
Pengeluaran rata-rata perkapita	11,268	11,201	11,424	11,670	12,148
IPM BANGLI	69.36	70.60	71.47	71.99	72.51
IPM BALI	76.52	76.69	77.40	78.01	78.63
IPM Nasional	71.94	72.29	72.91	74.39	75.02

(Sumber: BPS Provinsi Bali, 2025)

Tabel 2.17 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli menunjukkan kondisi yang membaik, meskipun masih di bawah tingkat IPM propinsi Bali. IPM Bangli pada tahun 2022 sebesar 71,47 meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 69,36 walaupun masih lebih rendah dibanding IPM Provinsi Bali dan Nasional yang sebesar 77,40 dimana masuk kategori tinggi karena diatas 70%

Tabel 2.18 Persentase Penduduk Bersertifikat Kompetensi

	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Bersertifikat Kompetensi Kab. Bangli	2,71	84,53	30,34	21,69	70,09

Sumber : RPJMD Bangli, 2025

Tabel 2.18 data menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam. Tahun 2021 melonjak drastis hal ini kemungkinan ada program sertifikasi massal. Tahun 2022–2023 menurun tajam, bisa jadi karena program tersebut berhenti atau cakupan terbatas. Selanjutnya tahun 2024 kembali naik ke 70,09%, meski belum setinggi 2021, ini menunjukkan aktivasi ulang atau perluasan program sertifikasi kompetensi.

Tabel 2.19 Persentase Pekerja Informal

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pekerja Informal Kab. Bangli	N/A	68,65	72,27	73,73	69,43	63,76

Sumber : RPJMD Bangli, 2025

Tabel 2.19 tahun 2020–2022 terjadi tren meningkat, menunjukkan semakin banyak penduduk bekerja di sektor informal yang dipengaruhi pandemi sehingga mendorong pekerjaan non-formal. Tahun 2023–2024 memiliki tren menurun signifikan, yang dapat berarti:

- i. Meningkatnya kesempatan kerja formal.
- ii. Perbaikan kondisi ekonomi pasca-pandemi.
- iii. Adanya program pemerintah yang mendorong sertifikasi, pelatihan, atau penyerapan tenaga kerja formal.

2.2.2.2 Aspek Kesehatan

Fertilitas adalah komponen utama pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Fertilitas mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian pembangunan. Indikator fertilitas penduduk diantaranya adalah usia perkawinan, program kehamilan, keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi. Angka kelahiran total (*total fertility rate/ TFR*) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. TFR merupakan pengukuran yang menyatakan fertilitas pada akhir masa reproduksi dari suatu kohor hipotetis perempuan.

Angka kelahiran remaja/*Age Specific Fertility Rate (ASFR)* 10-14 tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 tahun atau 15-19 tahun pada suatu periode per 1.000 perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode. Keluarga berencana atau lebih akrab disebut KB adalah program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Dalam indikator keluarga berencana terdapat beberapa variabel, yaitu:

- a) *Unmet Need* adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.
- b) Prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) adalah perbandingan antara pasangan usia subur yang aktif menggunakan alat kontrasepsi modern, dalam satuan persentase.

- c) KB Pasca Persalinan (PP) merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode/ alat/ obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan, sedangkan KB Pasca Keguguran (PK) merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari.
- d) Peserta KB dibagi menjadi dua yaitu Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan atau keguguran.

Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Indikator Fertilitas Tahun 2019-2024 Kabupaten Bangli

Jenis Data	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kehamilan (Keseluruhan)	3686	3653	3655	3658	3656	3653
Jumlah Kehamilan (Program KB)						
TFR (%)	N/A	2,53	N/A	N/A	N/A	N/A
ASFR (%)	N/A	505,8	N/A	N/A	N/A	N/A
Unmeet Need						
KB Pasca Salin	1168	830	31132	1180	1674	1895
Peserta Aktif KB	33415	40562	31132	33545	32868	31844
mCPR	N/A	59,72 %	45,31%	49,67%	48,87%	48,78%
PUS (Pasangan Usia Subur)	38640	47034	39098	35386	39456	45432

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, 2025)

Mortalitas adalah informasi penting bagi pemerintah dan swasta dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah juga dapat diketahui melalui indikator kematian. Dalam penyusunan *grand design* kependudukan, yang menjadi indikator kematian atau mortalitas adalah kematian ibu dan anak.

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Berdasarkan Indikator Mortalitas

Jenis Data	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kematian Ibu Hamil	1	3	1	1	1	2
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	0	2119	0	0	0	0
Jumlah Kematian Ibu Pasca Melahirkan	5	2	4	1	1	2
Jumlah Kematian Anak dan Bayi	36	65	40	37	42	37
Angka Kematian Bayi (AKB) (Jumlah kematian bayi 0-12 bulan)/Jumlah Kelahiran Hidup x 1000	N/A	8,5	11,8	10,6	14,57	12,9

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, 2025 dan RPJMD Bangli, 2025)

Tabel 2.21 menunjukkan kematian ibu hamil, angka relatif rendah dan cenderung stabil (1–3 kasus/tahun). Tidak terlihat tren kenaikan atau penurunan signifikan, namun fluktuasi kecil dapat menunjukkan faktor risiko yang bersifat insidental seperti komplikasi kehamilan tertentu. Untuk kematian Ibu Melahirkan, terdapat anomali besar pada tahun 2020 dengan 2.119 kasus, sangat jauh di atas tahun lain (0 kasus). Angka ini terjadi karena pandemi Covid-19. Selanjutnya, kematian ibu pasca melahirkan, cenderung menurun dari 2019 (5 kasus) ke 2022–2023 (1 kasus), lalu sedikit naik di 2024 (2 kasus). Penurunan ini bisa mencerminkan perbaikan layanan pasca persalinan, akses kesehatan, atau keberhasilan program pemantauan ibu nifas.

Untuk kematian Anak dan Bayi, relatif fluktuatif di kisaran 36–65 kasus/tahun. Tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan (65 kasus), kemungkinan terkait dampak pandemi COVID-19, gangguan layanan kesehatan, atau faktor gizi dan infeksi. Setelah 2020, angka kembali stabil di sekitar 37–42 kasus. Angka Kematian Bayi (AKB) terdapat tren meningkat secara keseluruhan dari 2020 ke 2024. Puncaknya tahun 2023 dengan 14,57/1.000 kelahiran hidup, jauh lebih tinggi dibanding 2020. Tahun 2024 turun menjadi 12,9, tapi angka ini tetap mengkhawatirkan karena menunjukkan tantangan dalam kesehatan bayi. Faktor penyebab bisa mencakup:

- i. Akses pelayanan kesehatan ibu & anak.
- ii. Nutrisi ibu hamil & bayi.
- iii. Faktor lingkungan (sanitasi, air bersih, penyakit menular).

A. Peningkatan Status Gizi, Stunting, Persentase Asi Eksklusif

Penurunan signifikan balita bertubuh pendek pada Tabel 2.22 dari 2019 (1.506 balita) ke 2020 (798 balita). Penurunan berlanjut hingga 2023, dengan sedikit kenaikan pada 2024. Penurunan terbesar terjadi antara 2019–2020 (turun 47%). Kenaikan 2023–2024 cukup kecil (sekitar 3%). Terkait dengan pemberian ASI eksklusif pada tahun 2019–2021 ada kenaikan yang stabil, puncaknya 3.069 bayi pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022–2024 mengalami penurunan beruntun, cukup signifikan terutama di 2022 (-17,73%). Penurunan bisa dipengaruhi faktor kesadaran, program edukasi ASI, atau dampak pandemi yang memengaruhi layanan posyandu.

Tabel 2.22 Jumlah Balita Bertubuh Pendek dan Asi Eksklusif

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita Pendek (TB/U) usia 0-59 bulan yang ditimbang	1506	798	593	582	575	592
Data Persentase Asi Eksklusif	2809	3001	3069	2526	2307	2120
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	N/A	N/A	11,8	10,2	8,6	8,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, 2025

Tabel 2.22 jumlah balita pendek menurun drastis (indikasi membaiknya status gizi & kesehatan). Prevalensi stunting juga menurun, sesuai tren perbaikan nasional dalam program percepatan penurunan stunting. Namun, ASI eksklusif justru menurun sejak 2022, padahal ini faktor penting pencegahan stunting. Artinya, ada korelasi positif kebijakan intervensi gizi & kesehatan, tapi perlu perhatian untuk meningkatkan kembali pemberian ASI eksklusif.

B. Persentase Sanitasi Layak

Rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Fasilitas sanitasi ini mencakup toilet yang aman dan bersih, sistem pembuangan limbah yang efektif, serta akses yang memadai terhadap air bersih untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Akses sanitasi layak sangat penting untuk mencegah penyakit menular yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak higienis, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, sanitasi yang baik juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin ke-6 yang berfokus pada air bersih dan sanitasi. Implementasi sanitasi layak dalam rumah tangga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan edukasi tentang pentingnya sanitasi bagi kesehatan. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Berdasarkan Laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli Tahun 2025, rumah tangga di Kabupaten Bangli yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2019 Kabupaten Bangli pada rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 88,4%. Pada tahun 2020 sebesar 88,3%, rumah tangga memiliki

akses terhadap sanitasi yang layak. Setelah itu, terjadi peningkatan yang konsisten dari tahun 2021 sampai tahun 2024 sebesar 90,6%, 95,9%, 96,5% dan Tahun 2024 sebesar 96,5%.

Gambar 2.8 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak Di Kabupaten Bangli Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, 2025

Gambar 2.8 menunjukkan bahwa untuk akses sanitasi layak di kabupaten Bangli capaian tinggi diangka 96,5% di 2024, Bangli sudah berada pada level sangat baik secara nasional. Tantangan akhir tersisa $\pm 3,5\%$ rumah tangga tanpa sanitasi layak mungkin berada di daerah terpencil, memiliki keterbatasan lahan, atau hambatan sosial-ekonomi.

Tabel 2.23 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	3,55	3,55	97,26

Sumber: (RPJMD Bangli, 2025)

Pada tabel 2.23 tahun 2022–2023 hampir tidak ada kemajuan, dengan cakupan sangat rendah (hanya sekitar 3,5%). Tahun 2024 terjadi lompatan besar hingga 97,26%, yang kemungkinan disebabkan:

- i. Intervensi program besar-besaran (misalnya proyek sanitasi pemerintah/daerah).
- ii. Perubahan metode pengukuran atau cakupan survei.
- iii. Keberhasilan program percepatan sanitasi aman.

Tabel 2.24 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	43,99	55,51	40,59	43,7	47,23

Sumber: (RPJMD Bangli, 2025)

Tabel 2.24 tahun 2020–2021 menunjukan peningkatan signifikan (43,99 ke 55,51%). Tahun 2022 terjadi penurunan besar (40,59%), bisa jadi akibat kondisi ekonomi (pandemi, inflasi, keterbatasan program perumahan). Sedangkan tahun 2023–2024: tren mulai pulih, meski belum mencapai level terbaik (2021).

Tabel 2.25 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional(%)

	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional(%)	99,94	98,29	98,66

Sumber: (RPJMD Bangli, 2025)

Tabel 2.25 secara umum, cakupan sangat tinggi (lebih dari 98% penduduk tercakup JKN). Penurunan di 2023 relatif kecil, dan di 2024 terjadi pemulihan. Dengan angka di atas 98%, bisa disimpulkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar melalui JKN sudah hampir menyeluruh

Tabel 2.26 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat

	2019	2020
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	0.01%	0.01%

Sumber: RPJMD Kab. Bangli, 2021

Tabel 2.26 Kondisi infrastruktur drainase yang sangat rendah, hanya 0.01% drainase yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2019 dan 2020. Ini menunjukkan kerusakan, tersumbatnya saluran air, atau ketiadaan sistem drainase yang memadai di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bangli. Risiko banjir lokal meningkat di musim hujan. Kerusakan jalan dan fasilitas umum karena air yang tidak mengalir dengan baik. Menurunkan kualitas hidup warga dan mengganggu transportasi, terutama di daerah padat atau dataran rendah.

2.2.2.3 Pembangunan Keluarga Berkualitas

Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil dalam tatanan kehidupan manusia. Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau yang lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan orang yang ada di sekitarnya baik buruknya anggota keluarga, tetap tidak bisa merubah kodrat yang ada, garis besarnya yang baik diarahkan dan yang buruk diperbaiki tanpa harus menghakimi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami (Kepala keluarga), istri dan anaknya yang di sebut dengan Rumah Tangga atau dengan sebutan lainnya ialah keluarga kecil; sedangkan yang disebut dengan keluarga besar selain suami, istri dan anak-anaknya dirumah tangga tersebut terdapat orang tua atau disebut ayah dan ibu dari pihak suami dan juga terdapat anak-anaknya orang tua yang lain termasuk orang tua dari ayah (Kakek dan nenek).

UU Nomor 2 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri sejahtera, sehat, maju dan mandiri serta memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Harapan utama dari terbentuk dan terbinanya keluarga berkualitas adalah bagaimana menyiapkan anggota keluarga untuk menjadi insan yang berkualitas. Kualitas atau keunggulan yang dimiliki tentu saja akan menjadi modal utama bagi pembangunan dan dengan kualitas dimaksud anggota keluarga mampu memberikan peran yang baik dan berdaya guna. Kalau anggota keluarga adalah insan yang berkualitas, secara langsung atau pun tidak langsung mereka akan ikut mewarnai keadaan masyarakat secara keseluruhan, dan hal tersebut menjadi modal yang dibutuhkan untuk dapat menjawab berbagai persoalan atau tantangan yang muncul dalam kehidupan kedepannya.

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan Nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan. Adapun tantangan pembangunan keluarga antara lain masalah perceraian, masalah Stunting, Perkawinan Usia Anak, Kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kasus hukum pada anak dan penyalahgunaan narkoba.

Keluarga berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa. Keluarga menjadi lingkungan pertama untuk mengenalkan cinta kasih, agama, moral, budaya dan sebagainya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa.

Beberapa intervensi yang dapat dilakukan dalam mendukung program pembangunan keluarga, antara lain :

- a. Peningkatan akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak
- b. Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga
- c. Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga

Pembangunan Keluarga merupakan isu strategis yang harus diperhatikan oleh semua pihak (lintas sektor dan pemerintah daerah), agar dapat mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas.

Tabel 2.27 Pernikahan di Kabupaten Bangli

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Data Pernikahan	16	13	13	31	19	14

(BPS Prov Bali, 2025)

Tabel 2.27 menunjukkan penurunan 2020–2021 dimana terjadi penurunan dan stagnasi di angka 13, kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Lonjakan di 2022 dimana naik drastis menjadi 31, kemungkinan karena penundaan pernikahan dari tahun-tahun sebelumnya. Tren menurun setelah tahun 2022 Setelah lonjakan, jumlahnya menurun kembali, menunjukkan kondisi mulai stabil. Pada Tahun 2019–2021 mengalami penurunan dan stagnan:

1. Penurunan dari 16 ke 13, lalu stagnan di 13 (2020–2021).
2. Kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi acara sosial termasuk pernikahan.

Pada Tahun 2022 mengalami lonjakan yang tajam:

1. Naik tajam ke 31 — hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
2. Kemungkinan disebabkan karena:
 - a. Penundaan pernikahan tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi.
 - b. Pelonggaran aturan sosial dan kegiatan adat/resepsi.

Pada Tahun 2023–2024 (Menurun Lagi):

1. Turun ke 19 (2023), lalu turun lagi ke 14 (2024).
2. Bisa disebabkan oleh:
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Prioritas hidup generasi muda yang berubah
 - c. Kurangnya kesiapan/keinginan menikah

Tabel 2.28 Tingkat Perceraian

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Data Perceraian	9	1	5	7	5	10

Sumber : BPS Prov Bali, 2025

Pada Tabel 2.28 diatas, Penurunan tajam pada 2020 jumlah perceraian turun drastis menjadi hanya 1 kasus dibanding tahun sebelumnya (9 kasus di 2019). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh:

- a. Pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19
- b. Aktivitas pengadilan terbatas
- c. Kesulitan administratif dalam mengajukan gugatan

Peningkatan bertahap 2021–2022, Setelah pandemi mereda, jumlah perceraian kembali naik menjadi 5 kasus (2021) dan 7 kasus (2022). Kemungkinan besar karena:

- a. Konflik rumah tangga yang tertunda proses hukumnya selama pandemi
- b. Dampak ekonomi pasca pandemi

Stabil di 2023, lalu melonjak di 2024, Tahun 2023 kembali ke angka 5 kasus, tapi naik tajam menjadi 10 kasus di 2024, yang merupakan jumlah tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Ini bisa mengindikasikan:

- a. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
- b. Minimnya pembinaan rumah tangga
- c. Perubahan sosial (misalnya gaya hidup, ketidaksiapan menikah, tekanan ekonomi, dan lainnya)

Tabel 2.29 Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	NA	80,2	79,1	81	87,20	83,2

Sumber:RPJMD, 2025

Tabel 2.29 menunjukkan peningkatan kualitas pengasuhan keluarga remaja dari 2020 hingga 2023. Penurunan pada 2021 relatif kecil, dan setelah itu meningkat pesat di 2023. Tahun 2024 mengalami koreksi sedikit, namun nilainya masih jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020–2022.

Tabel 2.30 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Data Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	NA	NA	234	240	288	NA

(Sumber: Balisatudata.baliprov.go.id, 2025)

Data Tabel 2.30 diatas menunjukkan pada tahun 2021–2023, Peningkatan Bertahap:

- Dari 234 kelompok (2021) → 240 kelompok (2022) → 288 kelompok (2023)
- Terjadi peningkatan total +54 kelompok dalam 2 tahun.
- Persentase kenaikan:
 - 2021–2022: +2,56%
 - 2022–2023: +20% (kenaikan signifikan)

Kenaikan tajam pada 2023 menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap:

- Penguatan peran keluarga dalam tumbuh kembang anak
- Pencegahan stunting dan peningkatan gizi balita
- Program PKK atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berjalan lebih aktif

Kenaikan jumlah kelompok BKB bisa disebabkan oleh:

- Intervensi pemerintah terhadap stunting
- Dukungan desa/banjar terhadap posyandu dan pendidikan keluarga
- Kerja sama lintas sektor: Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PKK, BKKBN

Tabel 2.31 Garis Kemiskinan

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rupiah)	Rp329.014	Rp346.458	Rp370.732	Rp401.650	Rp436.928	Rp465.572

(Sumber : BPS Bangli, 2025)

Tabel 2.32 Kenaikan Garis Kemiskinan

Tahun	Kenaikan (Rp)	Kenaikan (%)
2019–2020	+17.444	+5,30%
2020–2021	+24.274	+7,01%
2021–2022	+30.918	+8,34%
2022–2023	+35.278	+8,79%
2023–2024	+28.644	+6,56%

(Sumber : Hasil Analisa, 2025)

Pada tabel 2.32 Garis kemiskinan meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi antara 2021–2023 (di atas 8% per tahun). Ini bisa mengindikasikan:

1. Inflasi harga kebutuhan dasar
2. Kenaikan harga pangan dan non-pangan
3. Perubahan metodologi BPS dalam menghitung kebutuhan hidup minimum

Tabel 2.33 Gini Ratio

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Data Gini Ratio	0,2744	0,2829	0,2850	0,2880	0,2820	0,3021

(Sumber : BPS Bangli, 2025)

Tabel 2.33 Kenaikan 2019–2022 bisa berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19, di mana sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan/pendapatan sementara kelompok lain tetap bertahan. Penurunan 2023 mungkin dipengaruhi pemulihan ekonomi dan berbagai program sosial pemerintah. Lonjakan 2024 ke 0,3021 menandakan tantangan baru, di mana pertumbuhan ekonomi mungkin belum sepenuhnya inklusif - masih ada kelompok yang lebih diuntungkan dibanding lainnya.

Tabel 2.33 Indeks Lansia Berdaya

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Lansia Berdaya	N/A	63,7	65,81	64,56	56,99	58

(Sumber : RPJMD Bangli, 2025)

Pada Tabel 2.33 peningkatan awal (2020–2021): Lansia relatif lebih berdaya dengan dukungan keluarga/masyarakat. Penurunan signifikan pada 2023 mungkin dipengaruhi faktor ekonomi, kesehatan, atau keterbatasan akses layanan sosial. Sedikit rebound pada tahun 2024 namun masih perlu perhatian khusus karena trennya belum stabil.

Tabel 2.34 Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	N/A	N/A	57,33	52,98	60,62	65,2

(Sumber : RPJMD Bangli, 2025)

Pada Tabel 2.34 data hanya tersedia mulai 2021. Tahun 2021–2022 sempat mengalami penurunan (dari 57,33 ke 52,98). Sedangkan tahun 2023–2024 meningkat signifikan, menunjukkan adanya perbaikan pembangunan keluarga (aspek ketentraman, kemandirian, kebahagiaan keluarga). Secara keseluruhan, tren positif meski sempat turun di 2022.

Tabel 2.35 Indeks Perlindungan Anak

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak	N/A	N/A	N/A	57,89	64,14	64,24

(Sumber : RPJMD Bangli, 2025)

Pada Tabel 2.35 data baru tersedia sejak 2022. Terjadi tren positif dari 2022 ke 2023 dengan peningkatan cukup tinggi. Tahun 2024 relatif stagnan namun tetap mempertahankan level tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kebijakan/program perlindungan anak yang cukup konsisten.

Tabel 2.38 Anak Terlantar

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Data Anak Terlantar	N/A	N/A	N/A	N/A	79	23

(Sumber: Balisatudata.baliprov.go.id)

Berdasarkan Tabel 2.38 diatas pada tahun 2023–2024 mengalami penurunan yang signifikan:

1. Dari 79 anak terlantar (2023) → turun ke 23 anak (2024)
2. Penurunan absolut: 56 anak
3. Penurunan relatif: sekitar 70,9%

Tabel 2.39 Lanjut Usia Terlantar

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Data Lanjut Usia Terlantar	N/A	N/A	N/A	N/A	282	35

(Sumber: Balisatudata.baliprov.go.id)

Dari tabel 2.39 terlihat pada tahun 2023–2024:

1. Penurunan sangat drastis, dari 282 lansia terlantar (2023) → menjadi hanya 35 orang (2024)
2. Penurunan absolut: 247 lansia
3. Penurunan relatif: sekitar 87,6%

2.2.2.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

A. Kepadatan Penduduk dan Migrasi

Masalah kependudukan klasik di Indonesia, selain jumlah penduduk yang besar, adalah persebaran penduduk yang tidak merata, baik antar pulau, provinsi maupun antar desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan persebaran penduduk. Kesenjangan tersebut akan memengaruhi pola, arah, dan tren mobilitas penduduk. Kecenderungannya adalah arus mobilitas penduduk berasal dari daerah yang belum maju menuju ke daerah yang lebih maju. Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini seiring dengan peningkatan secara signifikan perkembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Bangli. Hal ini dapat dilihat pada tabel kepadatan penduduk, di mana kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Susut. Meskipun laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Susut lebih rendah dibandingkan kecamatan lain, yaitu sebesar 1,16% per tahun, namun konsentrasi penduduk yang tinggi di area tertentu menyebabkan kepadatan penduduk tetap tinggi. Posisinya yang strategis menjadikannya mudah dijangkau dari berbagai penjuru kabupaten, sehingga menarik bagi penduduk yang mencari aksesibilitas lebih baik ke fasilitas publik, pasar, dan pusat ekonomi.

Tabel 2.40 Data Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Bangli

Kecamatan	Kepadatan Penduduk			
	2021	2022	2023	2024
Susut	965.76	974.47	980.46	985.08
Bangli	955.44	961.20	962.96	964.86
Tembuku	854.09	853.34	858.44	861.11
Kintamani	282.46	283.22	287.30	289.30
Kab. Bangli	469.27	471.15	475.27	477.56

(Sumber: BPSKabupaten Bangli, 2025)

Berdasarkan Tabel 2.40 diatas diperoleh gambaran bahwa:

a. Kecamatan Susut

- 1) Tertinggi secara konsisten selama 2021–2024.
- 2) Laju pertumbuhan +2% dalam 3 tahun
- 3) Indikasi urbanisasi cukup kuat, atau peningkatan hunian di sekitar kecamatan ini.

b. Kecamatan Bangli

- 1) Stabil di posisi kedua tertinggi.
- 2) Pertumbuhan paling lambat (+0,98%), artinya pertumbuhan penduduk atau pengembangan lahan cukup jenuh.
- 3) Kemungkinan besar wilayah ini adalah pusat administratif dan perdagangan.

c. Kecamatan Tembuku

- 1) Fluktuatif, tapi tren akhir meningkat.
- 2) Kenaikan +0,82% menunjukkan peningkatan bertahap, mungkin terkait pengembangan infrastruktur atau pemukiman baru.

d. Kecamatan Kintamani

- 1) Terendah secara konsisten, namun mengalami laju pertumbuhan tertinggi (+2,42%).
- 2) Ini menarik, karena Kintamani selama ini dikenal sebagai daerah agraris dan pariwisata alam.
- 3) Kenaikan ini bisa disebabkan oleh:
 - a) Peningkatan pariwisata sehingga mengakibatkan penambahan hunian.
 - b) Migrasi ke daerah sejuk dan alami pasca pandemi.

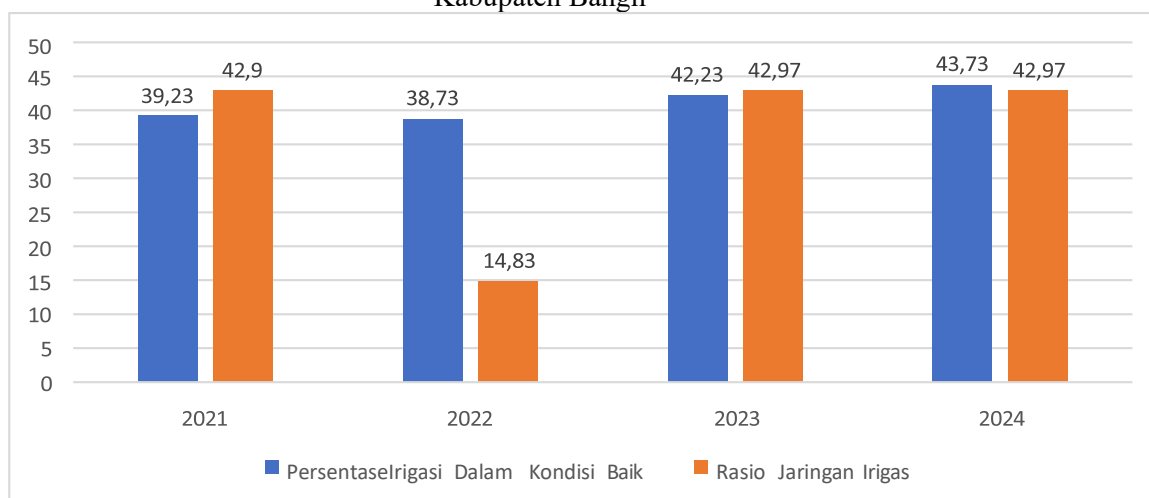
e. Kabupaten Bangli secara keseluruhan

- 1) Rata-rata naik dari 469,27 → 477,56 jiwa/km² (+1,77%).
- 2) Pertumbuhan stabil, tidak ada lonjakan besar, mengindikasikan pengembangan wilayah yang masih terkontrol.

Meskipun demikian, angka ini masih berada di bawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada kemajuan, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sistem irigasi di kabupaten ini berfungsi dengan optimal. Kualitas dan cakupan pelayanan jaringan irigasi merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Sistem irigasi yang baik memastikan bahwa tanaman mendapatkan air yang cukup, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan hasil panen yang maksimal. Tanpa jaringan irigasi yang memadai, petani akan kesulitan dalam menjaga produktivitas lahan mereka, terutama selama musim kemarau atau dalam kondisi cuaca yang tidak menentu.

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang berkelanjutan dan intensif untuk mendorong peningkatan kualitas jaringan irigasi di Kabupaten Bangli. Dengan meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik dan rasio jaringan irigasi di atas 50%, Kabupaten Bangli dapat memastikan bahwa sektor pertaniannya semakin tangguh dan produktif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan hasil panen, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambar 2.9
Perkembangan Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bangli

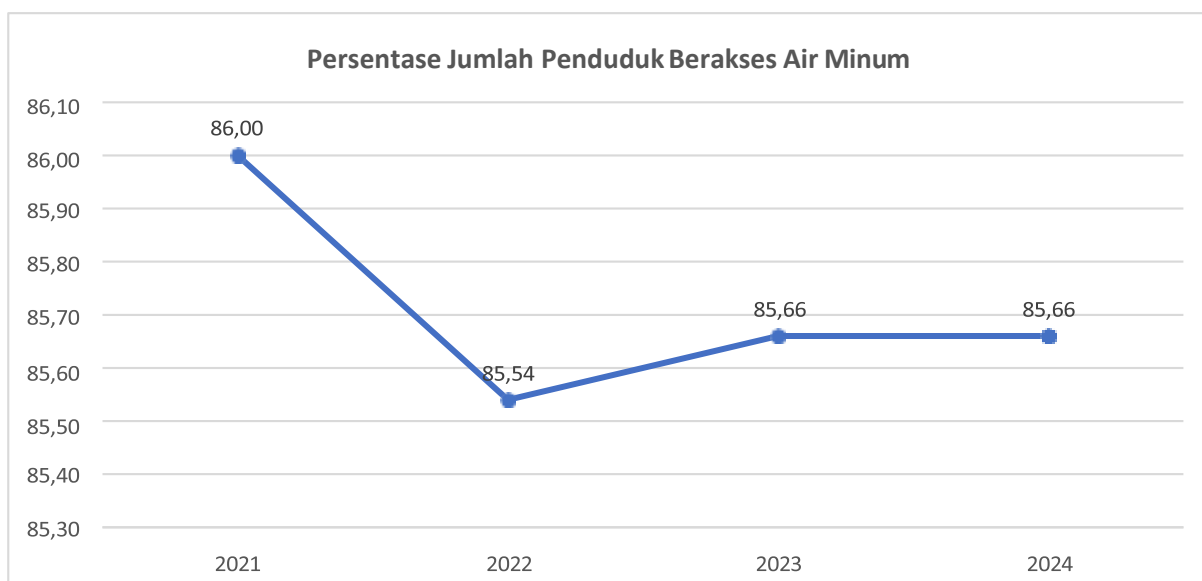


Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

Berdasarkan gambar 2.9, pada 2022, persentase kondisi irigasi baik relatif stabil (38,73%), namun rasio jaringan irigasi justru sangat rendah. Hal ini bisa berarti jaringan yang ada sebagian besar masih berfungsi baik, tetapi total jaringan yang tersedia sangat berkurang. Tahun 2023–2024 menunjukkan perbaikan simultan: jaringan irigasi kembali normal dan kondisi baik meningkat, mengindikasikan pemeliharaan dan pembangunan berjalan seiring.

Air minum layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendorong peningkatan cakupan pelayanan air minum layak hingga mencapai 100%. Upaya ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Bangli dapat menikmati akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Dengan mencapai cakupan 100%, Kabupaten Bangli dapat memastikan bahwa setiap warganya memiliki akses ke air minum yang aman, yang merupakan fondasi penting untuk kehidupan yang sehat dan produktif.

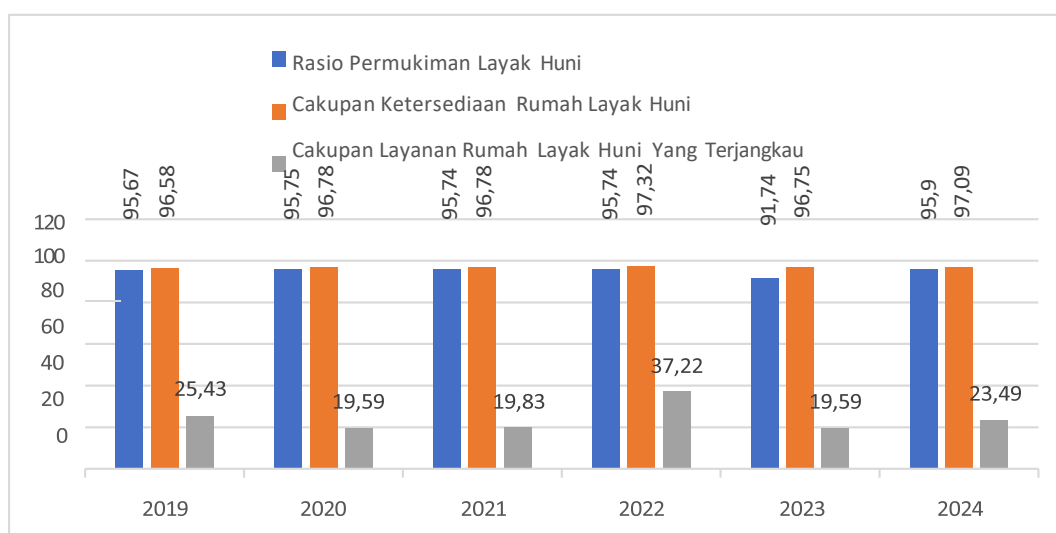
Gambar 2.10
Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Bangli Tahun 2021-2024



Sumber: Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, 2024

Pada tahun 2021, sebanyak 86,00% penduduk telah memiliki akses terhadap air minum. Namun, pada tahun 2022, terjadi sedikit penurunan persentase menjadi 85,54%. Meski demikian, upaya peningkatan akses air minum berhasil ditingkatkan secara signifikan pada tahun 2023, di mana persentase penduduk yang berakses air minum naik menjadi 85,66% dan tetap sama pada tahun 2024 (85,66%). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam penyediaan air minum di Kabupaten Bangli.

Gambar 2.11 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni



Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kabupaten Bangli Tahun 2024

Gambar 2.11 Hampir seluruh kawasan permukiman di Kabupaten Bangli sudah termasuk dalam kategori permukiman layak huni. Pada tahun 2024, rasio kawasan permukiman layak huni di Kabupaten Bangli mencapai 95,9%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wilayah permukiman di kabupaten ini sudah memenuhi standar kelayakan, yang mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan infrastruktur dasar, akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, serta kualitas bangunan yang baik. Selain itu, cakupan ketersediaan rumah layak huni juga cukup tinggi, yaitu sebesar 97,9%. Meski demikian, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap rumah layak huni, terutama dalam menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan akan bangunan rumah akibat pertambahan penduduk harus diantisipasi dengan kebijakan dan program yang tepat.

Saat ini, pembangunan kawasan permukiman masih terkonsentrasi di Bangli Selatan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara Bangli Selatan dan Bangli Utara. Ketimpangan ini dapat berdampak negatif terhadap pemerataan kesejahteraan dan akses terhadap layanan dasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang lebih merata dalam pembangunan kawasan permukiman agar setiap wilayah mendapatkan perhatian dan pembangunan yang seimbang.

Tabel 2.41 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri

	2023	2024
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	0	33,3

Sumber : RPJMD Bangli, 2025

Pada tabel 2.41 tahun 2023 belum ada kampung keluarga yang mencapai status Mandiri. Tahun 2024 terjadi lonjakan menjadi 33,3%, artinya sepertiga dari kampung keluarga sudah masuk kategori Mandiri. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan cepat dalam program pembangunan keluarga berbasis komunitas.

2.2.2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan dalam pembangunan kependudukan adalah sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (database) kependudukan nasional dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, pada gilirannya nanti akan dapat didayagunakan untuk kepentingan perencanaan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan. Sumber data kependudukan dapat diambil dari beberapa sumber yaitu:

- a. Pertama, sensus penduduk dengan informasi yang dikumpulkan bersifat umum, dilakukan di seluruh Indonesia, untuk semua penduduk, tidak menggunakan sampel penduduk atau sampel wilayah, dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali.
- b. Survei kependudukan untuk pengumpulan data umum dan khusus. Data kependudukan yang umum didapatkan dari SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) yang dilaksanakan 10 tahun sekali dan yang khusus misalnya Sakernas untuk bidang ketenagakerjaan yang dikumpulkan dua kali dalam setahun. Di samping itu, Indonesia juga melaksanakan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang terdiri dari Susenas inti untuk pengumpulan data pokok bidang sosial ekonomi yang dilakukan sekali setahun dan Susenas Modul untuk data yang lebih rinci atau khusus, seperti pendapatan, pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan tempat tinggal, dan sosial budaya lainnya yang dilakukan setiap tiga tahun.
- c. Registrasi atau pendaftaran penduduk yang dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan. Dalam sistem ini, penduduk dan/atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, dan RW. Apabila penduduk atau rumah tangga pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan yang terjadi. Sifat pasif dalam melaporkan perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama dari pelaksanaan registrasi/pendaftaran penduduk. Secara normatif, registrasi penduduk merupakan sumber data yang paling ideal. Hal ini didasarkan pada karakteristik data registrasi penduduk. Pertama, dari sisi cakupan, registrasi penduduk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mencakup unit administrasi terkecil, yaitu desa/kelurahan. Hal ini memungkinkan penggunaan hasil registrasi penduduk untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Kedua, registrasi penduduk dilaksanakan secara kontinyu, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan setiap waktu. Sebagai sumber data yang ideal, registrasi penduduk sampai dengan saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu masalahnya adalah kualitas data yang rendah.

Sumber masalah tersebut di antaranya adalah penggunaan sistem pasif yang dalam tingkat tertentu bersamaan dengan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan kejadian demografis, menyebabkan data yang terkumpul *underreporting*. Persoalan yang perlu dicari pemecahannya adalah membuat penduduk lebih proaktif untuk melaporkan perubahan status kependudukan kepada petugas yang berwenang pada tingkat RW dan kelurahan, bahkan RT sebagai ujung tombak pendaftaran penduduk. Memperkuat pemahaman dalam pencatatan dan pelaporan pada lini paling bawah ini sangat penting karena kelengkapan dan kualitas data berada pada tingkat desa. Pada tingkat desa inilah sebagian besar daftar isian atau formulir pencatatan tersedia secara lengkap.

Data dasar (database) kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Untuk itu, diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Untuk membangun data dasar (database) kependudukan, saat ini sedang dibangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam kerangka administrasi kependudukan, yang terdiri dari hal-hal berikut:

1. Sistem Pendaftaran Penduduk (Dafduk).
 - a. Pencatatan biodata penduduk per keluarga;
 - b. Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan;
 - c. Pendataan penduduk rentan kependudukan;
 - d. Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri.
2. Sistem Pencatatan Sipil (Capil).
 - a. Pencatatan kelahiran;
 - b. Pencatatan lahir mati;
 - c. Pencatatan perkawinan;
 - d. Pencatatan pembatalan perkawinan;
 - e. Pencatatan perceraian;
 - f. Pencatatan pembatalan perceraian;

- g. Pencatatan kematian;
- h. Pencatatanpengangkatan pengesahan dan pengakuan anak;
- i. Pencatatanperubahan nama dan perubahan statu kewarganegaraan;
- j. Pencatatan peristiwa penting;
- k. Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri.

Tabel 2.42 Data Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik

Tahun	Jumlah Pemilik KTP Elektronik
2019	180.727
2020	184.835
2021	186.605
2022	160.416
2023	163.654
2024	194.099

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, 2025

Berdasarkan tabel 2.42, tahun 2022 menjadi anomali yang patut diperhatikan karena penurunan tajam, berbeda jauh dari tren tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan besar di 2024 dapat menjadi indikasi bahwa target cakupan hampir maksimal atau ada kebijakan nasional yang mendorong perekaman massal.

Tabel 2.43 Data Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran

Tahun	Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran
2019	94.932
2020	164.677
2021	107.857
2022	114.726
2023	120.647
2024	125.629

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, 2025

Pada Tabel 2.43, capaian 125.629 di 2024 menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan. Namun, penurunan besar di 2021 menjadi catatan penting untuk memastikan validitas data dan keberlanjutan pencatatan.

Tabel 2.44 Kepemilikan Dokumen Kematian

Tahun	Jumlah Kepemilikan Dokumen Kematian
2019	7.496
2020	9.138
2021	10.129
2022	17.891
2023	19.480
2024	22.207

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, 2025

Pada tabel 2.44, peningkatan jumlah dokumen kematian tidak selalu berarti peningkatan angka kematian, tetapi bisa mencerminkan keberhasilan pendataan dan kepatuhan administrasi. Ketersediaan data kematian yang akurat penting untuk perencanaan kesehatan, perlindungan sosial, dan pengelolaan data kependudukan

Tabel 2.45 Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak

Tahun	Jumlah Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak
2019	-
2020	-
2021	21.029
2022	24.327
2023	26.653
2024	36.291

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, 2025

Berdasarkan tabel 2.45, pertumbuhan awal (2021–2023) relatif moderat, menandakan proses sosialisasi dan pelayanan yang bertahap. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan tajam, yang kemungkinan disebabkan oleh program percepatan perekaman KIA di sekolah, kampanye masif di masyarakat, atau adanya target nasional.

Tabel 2.46 Cakupan Dokumen Akta Perkawinan

Tahun	Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan
2019	57.411
2020	64.894
2021	68.704
2022	73.713
2023	77.182
2024	80.498

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, 2025

Tabel 2.46 menunjukan pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2019–2020. Setelah itu, pertumbuhan melandai namun tetap positif, yang menandakan sistem pencatatan sudah berjalan rutin.

Tabel 2.47 Cakupan Dokumen Akta Perceraian

Tahun	Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Perceraian
2019	688
2020	808
2021	872
2022	1.051
2023	1.197
2024	1.346

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, 2025

Tabel 2.47, menunjukan pertumbuhan relatif stabil namun cenderung melambat dibandingkan lonjakan 2019–2020 dan 2021–2022. Kenaikan ini tidak selalu berarti meningkatnya angka perceraian, tetapi bisa mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pencatatan perceraian secara resmi di Disdukcapil

Tabel 2.48 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak

Tahun	Jumlah Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak
2019	10
2020	32
2021	6
2022	3
2023	2
2024	1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, 2025

Tabel 2.48, menunjukkan menunjukkan tren penurunan tajam pasca-2020.

Hal ini bisa berarti:

- a. Penurunan jumlah kasus pengangkatan anak yang dilakukan secara formal.
- b. Perubahan kebijakan atau prosedur pencatatan yang lebih ketat.
- c. Masyarakat lebih jarang melakukan adopsi formal, atau memilih jalur non-formal yang tidak tercatat.

Tabel 2.49 Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak

Tahun	Jumlah Dokumen Akta Pengesahan Anak
2019	59
2020	135
2021	15
2022	15
2023	9
2024	7

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, 2025

Berdasarkan tabel 2.49, ada *spike* besar di 2020, diikuti oleh penurunan tajam dan berlanjut hingga 2024.

Tabel 2.50 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Nama

Tahun	Jumlah Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Nama
2019	89
2020	113
2021	18
2022	12
2023	19
2024	11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, 2025

Pada tabel 2.50, terdapat lonjakan di awal (2020) diikuti penurunan tajam dan fluktuasi kecil pada tahun-tahun berikutnya. Pola ini menunjukkan bahwa perubahan nama resmi adalah layanan dengan permintaan rendah dan tidak rutin, biasanya terjadi karena faktor khusus seperti kesalahan penulisan, alasan agama, atau adat.

2.2.2.6 Peningkatan Kualitas Aspek Perekonomian

Pendapatan per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu daerah sebagai hasil dari aktivitas ekonomi. Pendapatan per kapita di suatu daerah didapatkan melalui pembagian seluruh pendapatan regional (*Product Domestic Regional Bruto*) dibagi dengan seluruh penduduk di suatu daerah.

Tabel 2.51 Pendapatan Daerah Regional Bruto per Kapita Kabupaten Bangli (dalam Milyar Rupiah) Berdasarkan Lapangan Usaha atau Industri

Kategori PDRB	PDRB menurut Lapangan Usaha (Milyar) Harga Belaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp1.870,28	Rp1.870,11	Rp1.928,38	Rp2.035,01	Rp2.159,46	Rp2.305,08
Pertambangan dan Penggalian	Rp128,03	Rp126,72	Rp125,21	Rp131,51	Rp139,86	Rp141,07
Industri Pengolahan	Rp632,52	Rp607,31	Rp603,80	Rp641,51	Rp681,84	Rp706,34
Pengadaan Listrik dan Gas	Rp2,71	Rp2,73	Rp2,88	Rp3,06	Rp3,48	Rp3,64
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Rp4,29	Rp4,56	Rp4,73	Rp4,77	Rp4,88	Rp4,90
Konstruksi	Rp562,04	Rp567,79	Rp613,10	Rp654,65	Rp675,51	Rp685,42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp714,09	Rp661,43	Rp672,88	Rp738,88	Rp807,99	Rp831,32
Transportasi dan Pergudangan	Rp80,08	Rp74,46	Rp72,46	Rp79,73	Rp89,15	Rp97,25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp975,44	Rp763,21	Rp704,73	Rp821,60	Rp964,65	Rp1.138,98
Informasi dan Komunikasi	Rp292,79	Rp313,72	Rp329,75	Rp338,27	Rp354,24	Rp374,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	Rp193,28	Rp184,70	Rp189,42	Rp222,15	Rp257,97	Rp298,91
Real Estate	Rp215,03	Rp217,60	Rp220,63	Rp232,40	Rp241,14	Rp247,72
Jasa Perusahaan	Rp38,13	Rp37,51	Rp36,89	Rp40,36	Rp42,96	Rp47,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Rp774,18	Rp778,68	Rp811,02	Rp843,31	Rp895,26	Rp956,30
Jasa Pendidikan	Rp171,61	Rp171,45	Rp177,02	Rp179,63	Rp181,36	Rp186,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Rp106,86	Rp109,77	Rp113,04	Rp119,67	Rp124,99	Rp130,92
Jasa lainnya	Rp232,28	Rp224,32	Rp219,63	Rp251,49	Rp283,56	Rp308,34
PDRB	Rp6.993,64	Rp6.716,09	Rp6.825,56	Rp7.337,99	Rp7.908,31	Rp8.465,60

(Sumber: BPS Kabupaten Bangli, 2025)

Berdasarkan tabel 2.51 sektor bertumbuh tinggi yaitu pada penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan sebesar 16,77%. Pemulihan pasca-pandemi, penguatan pariwisata seperti administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jamsos meningkat sebesar 23,53 %. Kenaikan belanja pemerintah pada industri pengolahan meningkat 11,67% dan pertumbuhan sektor manufaktur lokal.

Sektor yang stabil adalah pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan pada 23%. Sektor bertumbuh lambat yaitu pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan yang sangat kecil. Pengadaan air, sampah, limbah relatif stagnan. Transportasi dan pergudangan mulai pulih 2022–2024 setelah sempat turun saat pandemi

Tabel 2.52 Pendapatan Daerah Regional Bruto per Kapita Kabupaten Bangli

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB Perkapita	30,72	26,04	26,32	28,18	30,26	32,27

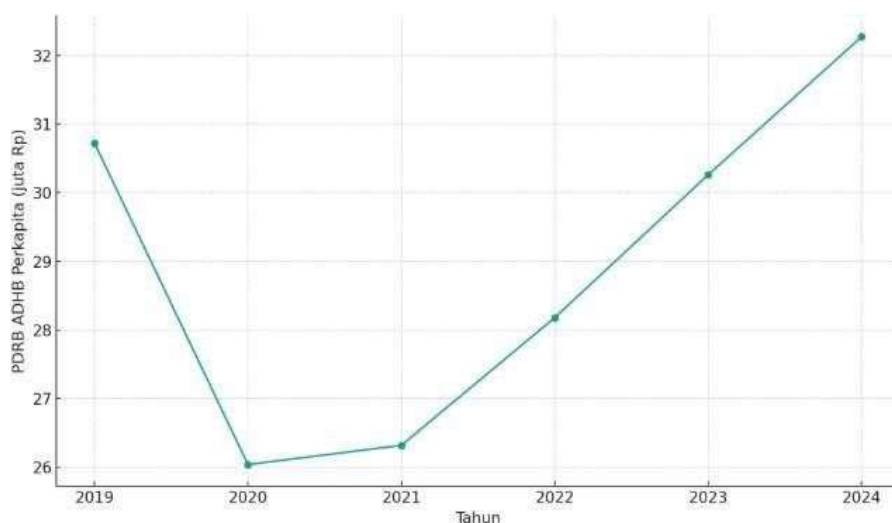
Sumber: BPS Kabupaten Bangli, 2025

Dari tabel 2.52 menunjukkan penurunan tajam di 2020 (-15,24%) merupakan dampak signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap ekonomi daerah, termasuk sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa di Bangli. Pemulihan perlahan di 2021 (+1,08%) pertumbuhan masih lambat karena efek pandemi belum sepenuhnya pulih. Pemulihan stabil 2022–2024 (+6–7% per tahun) menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup konsisten, kemungkinan didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, pariwisata lokal, dan investasi. Secara keseluruhan PDRB ADHB per kapita telah berhasil kembali melampaui level pra-pandemi (30,72 juta pada 2019) di tahun 2023 (30,26 juta) dan makin meningkat di 2024 (32,27 juta).

Berdasarkan definisi BPS, Kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur melalui sisi pengeluaran. Seseorang dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan dibawah garis kemiskinan.

Gambar 2.12

Perkembangan PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Bangli



Gambar 2.12 perkembangan PDRB ADHB Perkapita Kabupaten Bangli dari tahun 2019 hingga 2024. Terlihat penurunan tajam pada tahun 2020 akibat dampak pandemi, diikuti dengan pemulihan bertahap hingga 2024.

Tabel 2.53 Garis Kemiskinan Kabupaten Bangli

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rupiah)	Rp329.014,00	Rp346.458,00	Rp370.732,00	Rp401.650,00	Rp436.928,00	Rp465.572,00

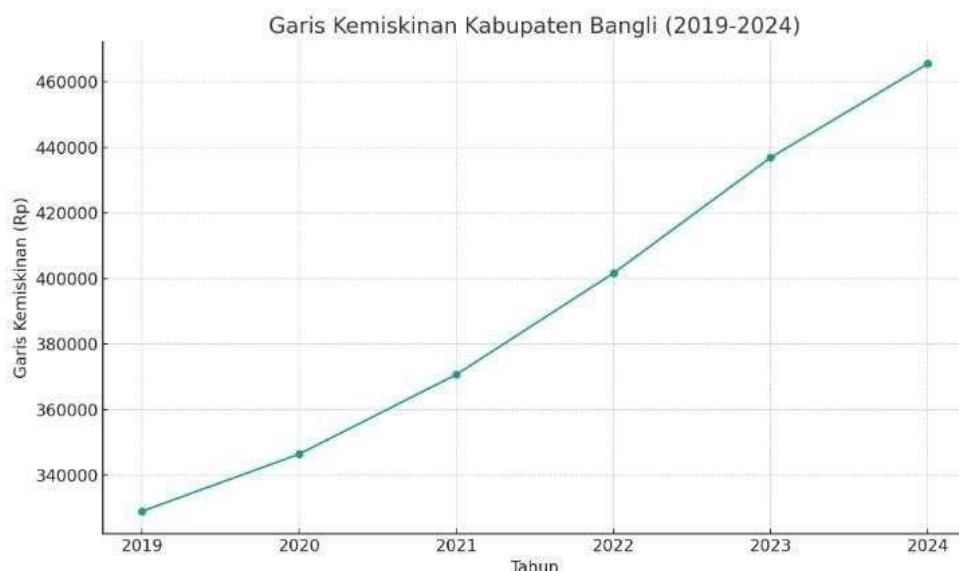
Sumber : BPS Kabupaten Bangli, 2025

Pada tabel 2.53, Garis kemiskinan meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi antara 2021–2023 (di atas 8% per tahun).

Ini bisa mengindikasikan:

- Inflasi harga kebutuhan dasar
- Kenaikan harga pangan dan non-pangan
- Perubahan metodologi BPS dalam menghitung kebutuhan hidup minimum Garis kemiskinan di Kabupaten Bangli terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 – 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh terus meningkatnya pendapatan per kapita Kabupaten Bangli.

Gambar 2. 13 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Bangli



Gambar 2.13 Grafik Garis Kemiskinan di Kabupaten Bangli dari tahun 2019 hingga 2024. Terlihat tren kenaikan setiap tahun, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak di kabupaten Bangli.

2.2.2.7 Aspek Sarana dan Prasarana

Transportasi merupakan salah satu prasarana utama dalam perkembangan wilayah, semakin mudah akses transportasi masuk dan keluar wilayah tersebut, semakin pesat perkembangan wilayah tersebut. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Infrastruktur jalan juga sangat menunjang keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terutama dikaitkan dengan aksesibilitas menuju ke sekolah. Akses jalan yang semakin baik memudahkan peserta didik ke sekolah serta efisiensi biaya dan waktu. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai dalam jangka panjang dapat mendorong kinerja pendidikan yang lebih baik dan bermutu.

2.2.2.8 Program Kerja Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan

Capaian Kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018-2023 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.54 Capaian Kinerja urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (Tahun)						2024
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Indikator Sarana RPJMD								
1	Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat	80,50	82,00	87,67	N/A	N/A	N/A	N/A
	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangli, 2024)							
Indikator Sasaran RENSTRA								
1	Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik	N/A	180.727	184.835	186.605	160.416	163.654	194.099
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (akta kelahiran)	N/A	94.932	164.677	107.857	114.726	120.647	125.629
3	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,50
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.28	2.26	2.48	2.71	2.28	2.26	2.48

(Sumber : RPJMD 2025 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangli 2025)

Tabel 2.54 pada kinerja pelayanan publik (kepuasan masyarakat) meningkat hingga 2020, tapi data terbaru tidak tersedia. Administrasi kependudukan (KTP-el & akta kelahiran) sempat turun, namun kembali meningkat pada 2024. SPBE menunjukkan inkonsistensi; perlu stabilisasi agar transformasi digital pemerintahan berkelanjutan. IKAD baru tersedia 2024, bisa menjadi indikator penting untuk inklusi keuangan daerah.

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK

DAN SITUASI IDEAL KEPENDUDUKAN

3.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Proyeksi Penduduk

Dalam proyeksi pengendalian kuantitas penduduk, terdapat beberapa aspek yang dilihat yaitu: jumlah penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), *Dependency Ratio* (DR), *Gross Reproduction Rate* (GRR), *Net Reproduction Rate* (NRR), *Crude Birth Rate* (CBR), *Total Fertility Rate* (TFR), Jumlah kelahiran, *Infant Mortality Rate* (IMR) laki-laki dan perempuan, *Crude Death Rate* (CDR), dan Jumlah Kematian. Kondisi kependudukan yang diinginkan untuk jangka Panjang secara umum adalah tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah kondisi di mana jumlah fertilitas sama atau hamper sama (seimbang) dengan mortalitas.

Kondisi kependudukan yang diinginkan untuk jangka Panjang secara umum adalah tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah kondisi di mana jumlah fertilitas sama atau hamper sama (seimbang) dengan mortalitas, atau dapat dikatakan jumlah jumlah bayi yang dilahirkan diharapkan sama, atau hampir sama (seimbang) dengan jumlah kematian, sehingga penduduk cenderung tetap (*stationer*). Indikator tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah tercapainya Angka Reproduksi Neto (*Net Reproduction Rate*/NRR) sebesar 1 (satu), angka *Total Fertility Rate*/TFR sebesar 2,1 serta angka keikutsertaan ber-KB atau *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) minimal 70 persen. Angka Reproduksi Neto (NRR) adalah angka fertilitas yang telah memperhitungkan faktor mortalitas, yaitu kemungkinan bayi perempuan meninggal sebelum mencapai akhir masa reproduksinya. Asumsi yang dipakai adalah bayi perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas dan pola mortalitas ibunya. Angka NRR, TFR dan CPR tersebut di atas merupakan 3 syarat yang harus dapat dipertahankan selama 40 tahun berturut-turut, tidak boleh mengendor apalagi memburuk agar tercapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (BKKBN, 2007: 3).

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan proyeksi perubahan demografi seperti pertumbuhan dan komposisi jumlah penduduk serta kondisi sosial kependudukan dalam memberikan gambaran struktur dan karakteristik penduduk. Hal ini berhubungan erat dengan potensi dan kualitas penduduk, mobilisasi, tingkat pelayanan dan penyediaan kebutuhan sektoral (sarana, prasarana maupun utilitas minimum). Selain itu analisis terhadap penyebaran dan perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan memberikan gambaran dan arahan kendala serta potensi sumber daya manusia untuk keberlanjutan pengembangan, interaksi, dan integrasi dengan daerah di luar WP. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi demografi terhadap batasan daya dukung dan daya tampung WP dalam jangka waktu rencana. Analisis ini digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan.

Hasil dari analisis kependudukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencana dalam merumuskan rekomendasi rencana mengingat pentingnya faktor penduduk sebagai obyek perencanaan. Tanpa analisis kependudukan, rencana yang dihasilkan akan menjadi rencana yang tidak valid dan susah diimplementasikan serta tidak terarah dengan baik karena urgensi penduduk sebagai subyek serta obyek pembangunan.

A. Kepadatan Penduduk

Untuk mengetahui kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Untuk mengetahui kepadatan penduduk di suatu perkotaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- Kepadatan penduduk bruto adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah
- Kepadatan penduduk netto adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah terbangun.

B. Persebaran Penduduk

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui persebaran penduduk antara perkotaan dan perdesaan, serta antar unit wilayah. Dalam menganalisis persebaran penduduk dapat dibedakan menjadi persebaran penduduk perdesaan dan perkotaan, dan persebaran penduduk antar unit wilayah. Angka persebaran penduduk perdesaan

dan perkotaan dapat diketahui melalui proporsi penduduk perdesaan dan perkotaan terhadap total jumlah penduduk. Sementara angka persebaran penduduk antar unit wilayah dapat diketahui dengan cara membandingkan kepadatan penduduk antar unit wilayah.

C. Perkiraan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkiraan jumlah penduduk dapat dilakukan dengan metode trend oriented, namun dapat pula menggunakan metode target oriented. *Trend oriented planning* adalah titik tolak berpikir yang memandang perencanaan sebagai suatu rangkaian proses untuk mencapai tujuan di masa mendatang dengan mempertimbangkan kejadian di masa lampau dan kenyataan masa kini. Dalam hal ini perencanaan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran masa mendatang dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan dan tuntutan yang berkembang pada masa lalu; serta kebutuhan, permasalahan dan tuntutan masa kini. Dalam proses perencanaan ini kecenderungan yang terjadi akan sangat penting sebagai pertimbangan untuk menentukan arah perkembangan di masa mendatang. Esensinya adalah menggunakan data masa lalu hingga masa sekarang (biasanya berupa data time series) untuk memprediksi kondisi di masa mendatang.

Model Regresi Linier digunakan untuk menentukan jumlah pertumbuhan penduduk di suatu perkotaan dengan asumsi terdapat hubungan linier antara tahun pengamatan dengan jumlah penduduk pada tahun pengamatan yang bersangkutan. Model matematisnya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y : Jumlah penduduk (proyeksi)

X : tahun pengamatan

a : intercept (nilai Y saat X = 0)

b : slope (laju pertumbuhan penduduk per tahun)

$\bar{X}$ = rata – rata tahun

$\bar{Y}$ = rata – rata jumlah penduduk

Menghitung slope $b = \frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sum(x-\bar{x})^2}$, menghitung intercept $a = \bar{y} - b\bar{x}$

Target *oriented* adalah titik tolak pemikiran yang lebih ditekankan semata-mata pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada masa mendatang. Dalam pendekatan ini suatu target ideal yang ingin dicapai di masa mendatang merupakan faktor penentu yang sangat penting. Target didasarkan pada keadaan masa kini untuk meningkatkan kondisi sekarang ke kondisi yang lebih baik di masa mendatang, dan sedikit sekali atau bahkan tidak memperhatikan kecenderungan yang terjadi di masa lalu dan masa kini. Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan dengan membuat skenario masa depan yang ideal, kemudian langkah-langkah perencanaan dilakukan sebagai usaha untuk mencapai kondisi masa depan tersebut.

3.1.1 Analisa Kependudukan Berdasarkan Jumlah Penduduk

Pada Kabupaten Bangli Analisa kependudukan dilakukan dengan Model regresi linier. Proyeksi jumlah penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk di masa mendatang. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk sangat penting dilakukan untuk memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana di suatu wilayah, khususnya Kabupaten Bangli dalam kurun waktu tertentu. Dalam melakukan perhitungan harus memperhatikan perkembangan jumlah penduduk masa lampau, kecenderungan, arahan tata guna lahan, dan ketersediaan lahan untuk menampung perkembangan jumlah penduduk. Metode yang digunakan adalah regresi linier (berdasarkan hasil pengujian dengan hasil simpangan terkecil) dengan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Bangli tahun 2025-2045 meliputi:

Tabel 3.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045

Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk				
	2025	2030	2035	2040	2045
Susut	50.028	51.640	53.252	54.864	56.476
Bangli	54.494	55.339	56.183	57.028	57.872
Tembuku	43.846	44.511	45.176	45.841	46.506
Kintamani	112.650	117.399	122.148	126.897	131.646
Kab. Bangli	261.020	268.890	276.761	284.631	292.502

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan hasil Analisa kependudukan Kabupaten Bangli tahun 2025-2045 di prediksi jumlah penduduk tahun 2045 Bangli adalah 292.502 jiwa. Diprediksi terjadi kenaikan jumlah penduduk yang signifikan dari 261.020 jiwa menjadi 292.502 jiwa dengan persentase kenaikan jumlah penduduk mencapai 12,06% dalam jangka waktu 20 tahun. Kecamatan Kintamani masih memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 131.646 jiwa atau 45,01% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bangli.

Berikutnya sebagai dasar dalam merencanakan penduduk maka perlu adanya Analisa terkait perkembangan penduduk berdasarkan umur hingga tahun 2050, berikut jumlah penduduk Kabupaten Bangli berdasarkan kelompok umur.

Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Umur	2025	2030	2035	2040	2045
00-04	13.353	13.755	14.157	14.560	14.963
05-10	18.096	18.641	19.188	19.733	20.279
11-14	21.016	21.649	22.282	22.916	23.549
15-19	20.373	20.987	21.602	22.216	22.830
20-24	21.006	21.639	22.272	22.906	23.539
25-29	19.561	20.150	20.741	21.330	21.920
30-34	17.627	18.159	18.691	19.222	19.754
35-39	16.823	17.331	17.837	18.345	18.852
40-44	19.652	20.245	20.838	21.431	22.023
45-49	19.358	19.942	20.525	21.109	21.693

50-54	17.527	18.056	18.584	19.113	19.641
55-59	14.324	14.755	15.187	15.619	16.051
60-64	12.294	12.664	13.035	13.406	13.776
65-69	9.804	10.100	10.396	10.691	10.987
70-74	7.529	7.756	7.983	8.210	8.437
>=75	10.226	10.535	10.844	11.152	11.461
	258.569	266.364	274.162	281.959	289.755

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan proyeksi penduduk berdasarkan umur diketahui bahwasanya pada tahun 2045 sebagian besar penduduk Kabupaten Bangli berada pada usia 10-14 tahun hal ini tentunya sebagai bonus demografi yang baik akan diterima oleh Kabupaten Bangli.

Berikut penjabaran tabel proyeksi penduduk kelompok umur berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan jenis kelamin

Tahun 2030			
Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
00-04	7.216	6.539	13.755
05-10	9.994	8.647	18.641
11-14	11.154	10.495	21.649
15-19	10.850	10.137	20.987
20-24	11.153	10.486	21.639
25-29	10.402	9.748	20.150
30-34	9.326	8.833	18.159
35-39	8.736	8.595	17.331
40-44	10.276	9.969	20.245
45-49	10.045	9.897	19.942
50-54	8.969	9.087	18.056
55-59	7.193	7.562	14.755
60-64	6.296	6.368	12.664
65-69	4.840	5.260	10.100
70-74	3.873	3.883	7.756
>=75	4.853	5.682	10.535
Total	135.176	131.188	266.364

Sumber: Hasil Analisa, 2025

3.1.2 Analisa *Dependency Ratio* (DR)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Berdasarkan hasil Analisa di Kabupaten Bangli pada tahun 2025 rasio ketergantungan memiliki nilai 32,14 artinya 100 Penduduk produktif menanggung 32 penduduk usia non produktif .

Tabel 3. 4 Proyeksi *Dependency Ratio* (DR)

2025	2030	2035	2040	2045
41,78 jt	44,11 jt	46,44 jt	48,76 jt	51,09
129,99 jt	131,56 jt	133,14 jt	134,71jt	136,28
32,14%	33,53%	34,88%	36,20%	37,49%

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi dari rasio ketergantungan bahwasannya angka rasio ketergantungan hingga tahun 2045 mengalami kenaikan menjadi 37,49.

3.1.3 Analisa Angka Kelahiran Kasar / *Crude Birth Rate*

CBR atau angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran pada suatu periode per 1000 penduduk pada periode yang sama. Pada angka kelahiran kasar terdiri atas 3 katagori yaitu:

- Golongan tinggi: jumlah kelahiran di atas 30 per 1.000 penduduk
- Golongan sedang: jumlah kelahiran antara 20-30 per 1.000 penduduk
- Golongan rendah: jumlah kelahiran di bawah 20 per 1.000 penduduk

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$CBR = \frac{B}{P} \times k$$

Keterangan :

CBR : Angka Kelahiran Kasar

B : Banyaknya Kelahiran pada tahun tertentu

P : Jumlah Penduduk pada pertengahan tahun tertentu

k : Bilangan konstanta, yaitu 1000

Dengan hasil berikut maka CBR Di Kabupaten Bangli Artinya rata-rata kelahiran bayi pada tahun 2024 adalah 11,39 anak per 1000 Penduduk dan termasuk dalam katagori rendah. berikut Tabel proyeksi CBR Kabupaten Bangli hingga tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Proyeksi *Crude Birth Rate* (CBR)

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Penduduk	261.020	268.890	276.761	284.631	292.502
Angka Kelahiran Kasar / CBR	10,964	9,202	7,961	7,087	6,471

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi *Crude Birth Rate* diketahui hingga tahun 2045 angka kelahiran kasar adalah 7 jiwa/1000 penduduk, hal tersebut tentu menjadi permasalahan tersendiri jika tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bangli.

3.1.4 Analisa Angka Fertilitas Umum / *General fertility rate* (GFR)

Angka Fertilitas Umum adalah banyaknya kelahiran pada suatu periode per 1.000 penduduk perempuan berumur 15–49 tahun atau 15–44 tahun pada pertengahan periode yang sama. Rumus GFR adalah sebagai berikut.

$$GFR = \frac{B}{Pf} \times k$$

Keterangan :

GFR : Angka Kelahiran Umum

B : Jumlah Kelahiran Hidup

Pf : Jumlah wanita usia reproduktif (15-49 tahun)

k : Konstanta, biasanya 1000

B adalah banyak kelahiran pada suatu periode dan P15–49f adalah jumlah penduduk perempuan usia 15–49 tahun pada pertengahan periode yang sama.

Pada kajian ini perlu memeperhitungkan angka fertilitas umum hingga tahun 2045, berikut tabel proyeksi angka fertilitas umum hingga tahun 2045.

Tabel 3. 6 Proyeksi *General fertility rate* (GFR)

2025	2030	2035	2040	2045
45,91	49,29	49,88	49,98	50

Sumber: Hasil Analisa, 2025

3.1.5 Analisa Angka Fertilitas Kelompok Umur/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR)

Angka Fertilitas Kelompok Umur adalah banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu periode tertentu per 1.000 perempuan pada kelompok umur dan pertengahan periode yang sama.

$$ASFR = \frac{\text{Jumlah kelahiran dari wanita usia } x \text{ s.d. } x+4}{\text{Jumlah wanita usia } x \text{ s.d. } x+4} \times 1000.$$

berikut hasil perhitungan angka fertilitas kelompok umur Kabupaten Bangli tahun 2020-2024.

Tabel 3. 7 Angka Fertilitas Kelompok Umur (ASFR)

Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
15-19	32,8	15,9	32,8	29,10	28,5
20-24	118,6	N/a	N/a	N/a	N/a
25-29	135,7	N/a	N/a	N/a	N/a
30-34	82,2	N/a	N/a	N/a	N/a
35-39	45,4	N/a	N/a	N/a	N/a
40-44	45,5	N/a	N/a	N/a	N/a
45-49	45,6	N/a	N/a	N/a	N/a

Sumber: Hasil Analisa, 2025

TFR= 5 X ASFR ratio = 2,1 Per 1000 wanita usia 15-49 Tahun = 2,1 per ibu. Artinya rata-rata perempuan di Kabupaten Bangli mempunyai 2-3 anak hingga akhir masa reproduksinya.

3.2 Analisa Mortalitas Penduduk

Dalam pengukuran mortalitas mati (death) adalah keadaan menghilangnya semua tandatanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Sementara itu, sehat adalah suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang lengkap dan tidak sekadar kondisi dimana penyakit dan badan lemah absen (*a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity*). Artinya, seseorang dinyatakan sehat jika sehat jiwa, raga, dan sosial.

Analisis mortalitas bermanfaat untuk sebagai berikut;

1. Analisis status demografi saat ini dari suatu populasi serta konsekuensinya pada pertumbuhan penduduk.
2. Memenuhi kebutuhan administrasi kesehatan dan penelitian bagi institusi kesehatan dalam hubungannya dengan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan masyarakat.
3. Penentuan aksi dan kebijakan administratif dalam hubungannya dengan program-program institusi-institusi pemerintah yang bergerak di luar bidang kesehatan masyarakat.
4. Memenuhi kebutuhan akan informasi tentang perubahan penduduk dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan profesional dan komersial.
5. Pembuatan analisis perubahan penduduk pada masa lampau yang dibutuhkan untuk proyeksi penduduk dan karakteristik demografi lainnya untuk perencanaan kebutuhan fasilitas perumahan dan pendidikan, manajemen program jaminan

social serta untuk produksi dan penyediaan pelayanan dan komoditas untuk berbagai kelompok penduduk.

6. Penentuan program-program pengendalian penyakit untuk perbaikan kesehatan masyarakat.
7. Memenuhi kebutuhan individu-individu akan dokumen kematian.

Seperti halnya pengukuran fertilitas, sumber data utama mortalitas adalah registrasi vital, sensus penduduk (SP) dan survei penduduk. Sistem registrasi vital merupakan sumber data mortalitas yang ideal jika kejadian kematian segera dilaporkan. Akan tetapi, terdapat permasalahan data kematian yang bersumber dari sistem registrasi vital. Pertama adalah yang berkaitan dengan ketepatan definisi mati. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai contoh, kematian bayi segera setelah lahir dianggap “lahir mati” dan “lahir mati” dilaporkan sebagai “mati.” Kedua adalah yang berkaitan dengan kelengkapan sistem registrasi, dimana tidak semua daerah dicakup dan tidak semua kejadian dilaporkan. Ketiga adalah yang berkaitan dengan tabulasi kematian menurut waktu/tempat pencatatan, bukan waktu/tempat kejadian. Sumber data mortalitas dari sensus/survei penduduk juga memiliki keterbatasan. Data kematian dicatat setelah kematian terjadi pada periode/waktu tertentu. Permasalahan yang timbul adalah masalah mengingat (*recall problem*), baik jumlah maupun waktunya. Permasalahan berikutnya adalah kejadian kematian jarang sehingga sampel untuk estimasi mortalitas harus besar.

Ukuran-ukuran mortalitas yang dibahas pada bagian ini meliputi angka kematian kasar, angka kematian menurut umur, angka kematian perinatal, angka kematian neonatal, angka kematian paskaneonatal, angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian anak usia bawah lima tahun (balita), harapan hidup saat lahir,

dan rasio kematian maternal.

3.2.1 Angkakematian kasar(*crude deathrate/CDR*)

Adalah banyaknya banyaknya kematian pada suatu periode per 1.000 penduduk pada pertengahan periode yang sama. Rumus untuk menghitung CDR adalah sebagai berikut.

$$CDR = \frac{\text{Jumlah Kematian pada tahun tertentu}}{\text{jumlah penduduk pertengahan tahun tertentu}} \times 1000$$

Dengan hasil berikut maka CDR Di Kabupaten Bangli Rata-rata per tahun 2023 adalah 19 orang per 1000 penduduk.

3.2.2 Angka kematian bayi (*infant mortality rate/IMR*)

Banyaknya kematian bayi (usia kurang dari satu tahun (0-11 bulan)) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama. Rumus untuk menghitung IMR adalah sebagai berikut

$$IMR = \frac{D}{B} \times k$$

Keterangan :

D : Kematian bayi usia di bawah 1 tahun pada tahun tertentu

B : Jumlah Kelahiran hidup satu tahun tertentu

K : bilangan konstanta, yaitu 1000

Dengan hasil berikut maka IMR Di Kabupaten Bangli per tahun 2024 Rata-rata adalah 12,6 Jiwa kematian bayi per 1000 kelahiran bayi.

Berikut manfaat data IMR.

- 1) IMR berguna sebagai indikator status kesehatan anak, penduduk, dan kondisi ekonomi penduduk.
- 2) IMR menunjukkan tingkat kesehatan ibu, tingkat kunjungan ante-natal dan post- natal ibu dan bayi, kebijaksanaan KB, kondisi

kesehatan lingkungan, serta tingkat dan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

- 3) IMR berkorelasi terbalik dengan status ekonomi orang tua, tanpa memandang ukuran status sosial dan ekonomi yang digunakan.
- 4) IMR turun sesuai dengan membaiknya standar hidup dan kondisi sanitasi dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 5) IMR mengukur probabilitas meninggal seseorang dari saat kelahiran sampai menjelang ulang tahunnya yang pertama.

3.2.3 Angkakematiananak (*child mortality rate/CMR*)

Adalah banyaknya kematian anak usia 1–4 tahun pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama. Rumus untuk menghitung CMR adalah sebagai berikut.

$$CMR = \frac{D}{P} \times k$$

Keterangan :

D : Jumlah Kematian anak (1-4 tahun) pada tahun tertentu

P : Jumlah anak (1-4 tahun) pertengahan tahun tertentu

K : konstanta , yaitu 1000

Dengan hasil berikut maka CMR Di Kabupaten Bangli Rata-rata per tahun 2020 adalah 3 Jiwa kematian anak per 1000 Kelahiran Anak.

Berikut adalah manfaat data CMR.

- 1) CMR menunjukkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak.
- 2) CMR tinggi pada keadaan salah gizi, higiene buruk, prevalensi penyakit menular tinggi, dan insiden kecelakaan di dalam atau sekitar rumah tinggi.

- 3) CMR lebih digunakan daripada AKB dalam mengukur tingkat kemiskinan.

3.2.4 Angka kematian Ibu (*Maternal Mortality Ratio*/MMR)

Adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil, proses persalinan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan oleh sebab-sebab lain (misal: kecelakaan). Rumus untuk menghitung MMR adalah sebagai berikut.

$$MMR = \frac{\text{jumlah kematian ibu pada tahun tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu}} \times 100.000$$

$$MMR = \frac{DM}{B} \times k$$

Keterangan :

DM = kematian ibu (mother death)

B = kelahiran hidup

K = konstanta , biasanya 100000 (oleh karena kasusnya kecil)

Dengan hasil berikut maka MMR Di Kabupaten Bangli pada tahun 2024 adalah 136 Jiwa kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup.

3.3 Peningkatan Kualitas Penduduk

Proyeksi Grand Design Peningkatan Kualitas penduduk ini mencakup kurun waktu 2025 sampai dengan 2045 dengan periode lima tahunan. Beberapa indikator yang diproyeksikan dalam peningkatan kualitas penduduk adalah Rata – rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Pasrtisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, dan Pendapatan per Kapita.

3.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Kegunaan APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang Pendidikan.

Tabel 3. 8 Angka Partisipasi Kasar

APK	2020	2021	2022	2023	2024
SD/setingkat	100.01	99.44	99.61	100.65	103.7
SMP/setingkat	104.97	108.38	110.31	91.41	82.64
SMA/setingkat	83.49	81.56	83.03	97.18	95.39
Perguruan Tinggi	12.48	13.91	16.19	17.65	18.03

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan angka partisipasi kasar tahun 2024 Kabupaten Bangli diketahui bahwasanya untuk angka partisipasi kasar Sekolah Dasar (SD)/Setingkat memiliki nilai 103,7 Nilai tersebut menunjukkan kenaikan sejak tahun 2021-2024. Untuk angka partisipasi kasar SMP/Setingkat diketahui bahwa tahun 2024 memiliki nilai 82,64, hal tersebut terus mengalami penurunan sejak tahun 2022 yang mencatat nilai tertinggi yaitu 110,31. Sedangkan untuk angka partisipasi kasar SMA/Setingkat diketahui tahun 2024 memiliki nilai 95,39 yang mengalami sedikit penurunan terhadap tahun 2023 yaitu 97,18. Dan terakhir angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi tahun 2024 yaitu 18,03 yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020.

Tabel 3. 9 Proyeksi Angka Partisipasi Kasar

APK	2025	2030	2035	2040	2045
SD/setingkat	103,58	103,51	103,7	103,55	103,49
SMP/setingkat	82,62	82,71	82,66	82,8	82,86

SMA/setingkat	95,47	95,55	95,57	95,49	95,57
Perguruan Tinggi	18,18	18,35	18,49	18,63	18,79

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan angka partisipasi kasar Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045, diperkirakan angka partisipasi kasar pada tahun 2045 untuk SD/setingkat adalah 103,49, untuk SMP/Setingkat 82,86, untuk SMA/Setingkat 95,57, dan untuk Perguruan Tinggi 18,79.

3.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Kegunaan menghitung APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tabel 3. 10 Angka Partisipasi Murni

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/setingkat	94.59	94.23	93.53	96.77	99.18
SMP/setingkat	90.85	91.18	90.83	74.9	76.31
SMA/setingkat	73.77	73.74	73.5	65.76	67.15
Perguruan Tinggi	11.51	12.12	15.65	12.08	12.99

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Bangli Tahun 2024 untuk seluruh jenjang belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh jumlah siswa masuk dan pindah di wilayah Kabupaten Bangli cukup tinggi. Untuk angka partisipasi murni jenjang SD/Setingkat adalah 99,18 Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020, untuk SMP Setingkat adalah 76,31 Mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 tetapi mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sedangkan SMA adalah 67,15 Mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 tetapi mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023, dan yang terakhir Perguruan Tinggi adalah 12,99 mengalami kenaikan sedikit dari tahun 2023, tetapi ini masih lebih rendah dibanding tahun 2022 yaitu 15,65.

Tabel 3. 11 Proyeksi Angka Partisipasi Murni Hingga

Jenjang Pendidikan	2025	2030	2035	2040	2045
SD/setingkat	99,12	99,16	99,16	99,31	99,4
SMP/setingkat	76,41	76,41	76,37	76,55	76,45
SMA/setingkat	67,1	67,21	67	66,89	67,18
Perguruan Tinggi	13,06	13,62	14,18	14,82	15,41

Sumber: Hasil Analisa, 2025

3.3.3 Indek Pembangunan Manusia

Indek Pembangunan Manusia untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan

sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Tabel 3. 12 Indek Pembangunan Manusia

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	70.60	70.60	71.47	71.99	72.51

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwasannya IPM tahun 2024 adalah 72,51, menjadi yang tertinggi sejak tahun 2020. Hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh faktor kesehatan dan Pendidikan yang mengalami peningkatan.

Dalam penentuan target IPM diperlukannya proyeksi dari indeks pembangunan manusia hingga tahun 2045, berikut tabel proyeksi indeks pembangunan manusia tahun 2045.

Tabel 3. 13 Proyeksi Indek Pembangunan Manusia

INDIKATOR	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Manusia	73	75,6	78,21	80,81	83,42

Sumber: Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwasannya IPM tahun 2045 adalah 83,42 hal ini harus pula di barengi dengan proyeksi kesehatan dan Pendidikan tahun 2045 yang terus meningkat.

3.4 Penataan Persebaran Dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Penataan persenaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi; dan mengurangi mobilitas penduduk ke Kabupaten Bangli.

Tabel 3.14 Pengarahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Pokok-Pokok	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Memiliki Grand Design Kependudukan untuk mengantisipasi timbulnya masalah kependudukan pada masa yang akan datang terutama terkait dengan perpindahan dan pergerakan penduduk.				
Sosialisasi pembangunan yang berwawasan kependudukan dimana penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan pada daerah penyangga PKW Kabupaten Bangli				

Pokok-Pokok	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Tersedia infrastruktur (jalan, halte, dll) dan yang memadai dan lengkap untuk memudahkan mobilitas kendaraan Penduduk di wilayah sekitar Kabupaten Bangli				
Tersedia sarana transportasi(bis kota, angkot) yang memadai dan lengkap untuk memudahkan mobilitas komuter dan sirkuler penduduk				
Sosialisasi, advokasi dan komunikasi mengenai kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada seluruh instansi terkait;				
Pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk kepada seluruh instansi terkait;				
Pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan				
Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah (desa-kota, kota-kota) dalam rangka Membangun Sistem Informasi Ketenagakerjaan				
Pelaporan data statistik penduduk migran permanen dan nonpermanen;				
Pengembangan sistem serta analisis database mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar Sistem Informasi				

Ketenagakerjaan				
Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan;				
Pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap efektivitas kebijakan Pengarahan Mobilitas Penduduk				
Pokok-Pokok	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Pengarahan gerak keruangan penduduk dengan mengadopsi visi jangka Panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.				
Pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan				
Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.				
Peningkatan infrastruktur intra dan antar wilayah untuk mengatasi permukiman kumuh				
Review menyeluruh untuk memperkirakan dampak positif dan negatif kebijakan migrasi (lalu lintas penduduk)				
Penyiapan Sumber Daya Manusia yang kompeten berstandar internasional terutama bagi Pekerja Migran Indonesia				
Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia				
Pemantauan kepemilikan paspor dan izin keimigrasian bagi orang asing				
Pelaporan data statistik mobilitas dan migrasi penduduk pekerja				

Sumber: Hasil Analisa, 2025

3.5 Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, keluarga yang mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Tabel 3. 15 Pembangunan Keluarga Kabupaten Bangli

Pokok Pokok	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental				
Penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga				
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga.				
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga.				
Pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga.				
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi.				

Sumber: Hasil Analisa, 2025

3.6 Penataan Data Informasi Kependudukan Serta Administrasi Kependudukan

Tujuan dari penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan adalah terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat ketepatan sasaran pembangunan.

Tabel 3. 16 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Pokok-Pokok	2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Periode konsolidasi ke dalam dan tertib administrasi kependudukan (satu data untuk semua) menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan terkoneksi.				
Periode pelayanan prima administrasi kependudukan dengan memanfaatkan Sitem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK).				
Periode pengembangan masyarakat berbasis pengetahuan (<i>knowledge-base society</i>) tentang database penduduk				
Periode integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.				
Periode penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat kelurahan				
Periode pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.				
Periode peningkatan pendayagunaan data dan Informasi kependudukan sebagai <i>Decision Support System (DSS)</i> atau <i>Sistem Pengambilan Keputusan (SPK)</i> dengan mempersiapkan Manajemen database, model database yang digunakan, dan pengelolaan dialog (user interface).				

Sumber: Hasil Analisa, 2025

3.7 Situasi Ideal Kependudukan

Pengelolaan kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Kondisi ideal dari sisi kuantitas dalam jangka panjang akan tercapai jika Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS). Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah kondisi di mana jumlah fertilitas sama atau hampir sama (seimbang) dengan mortalitas, atau dapat dikatakan jumlah jumlah bayi yang dilahirkan diharapkan sama atau hampir sama (seimbang) dengan jumlah kematian, sehingga penduduk cenderung tetap (stationer). Indikator tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) adalah tercapainya Angka Reproduksi Neto (Net Reproduction Rate/NRR) sebesar 1 (satu), angka Total Fertility Rate/TFR) sebesar 2,1 serta angka keikutsertaan ber-KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) minimal 70 persen.

Kondisi ideal kependudukan jika berdasarkan pada Penduduk Tumbuh Seimbang dari aspek pengelolaan kuantitas kependudukan di Kabupaten Bangli belum tercapai. Pada tahun 2025, nilai TFR mencapai angka 2,1 berarti sudah sesuai dengan nilai TFR yang disyaratkan yaitu sebesar 2,1.

Kondisi ideal kependudukan juga ada yang sudah tercapai jika melihat aspek peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Bangli. Namun juga ada aspek- aspek kualitas yang masih di bawah rata-rata. Masing - masing indikator peningkatan kualitas menunjukkan tren yang meningkat dan menurun. Rata – rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bangli sebesar 7,757 tahun belum melebihi wajib belajar selama 12 tahun pada tahun 2025, demikian pula untuk Rata – rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2045 yang sebesar 10,177 tahun belum memenuhi wajib belajar selama 12 tahun. Untuk nilai Angka Partisipasi Kasar (APK), APK Sekolah Dasar atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat sudah

mencapai kategori Tuntas Paripurna dan Tuntas Utama karena memiliki APK lebih dari atau sama dengan 95 persen. Sedangkan APK Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dari tahun 2023.sampai dengan tahun 2025 masuk kategori belum tuntas karena memiliki APK kurang dari 95 persen. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. AHH merupakan angkat pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Jika menilik pada besarnya AHH menurut standar United Nations Development Programme (UNDP) yaitu umur yang berada di kisaran $25 \text{ tahun} < \text{AHH} < 85 \text{ tahun}$ maka AHH Kabupaten Bangli sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh UNDP dengan besaran AHH berkisar antara 73-74 tahun. Semakin lamanya Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk di Kabupaten Bangli juga dipengaruhi oleh semakin bertambahnya pendapatan per kapita daerah tersebut. Suatu daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi umumnya memiliki standard of living yang tinggi juga. Dengan pendapatan yang tinggi, penduduk Kabupaten Bangli memiliki pola hidup yang lebih baik, misalnya dengan melakukan pemeriksaan Kesehatan secara berkala, mengunjungi pusat kebugaran dan memilih bahan makanan yang memiliki kualitas terbaik serta terjaga dari sisi kebersihannya. Selain itu, pendapatan per kapita yang tinggi juga akan mendorong semakin tingginya jenjang Pendidikan yang dapat dicapai dan Angka Harapan Hidup yang semakin lama.

BAB IV

VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

4.1 VISI

Grand design pembangunan kependudukan ialah suatu dokumen kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional. Dalam hal ini, *grand design* pembangunan kependudukan ialah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan (Prihantini, dkk., 2021).

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045 merupakan perencanaan kebijakan strategis yang memiliki hubungan sistematis dengan Pembangunan Nasional, Pembangunan Provinsi Bali, dan juga pembangunan ditingkatan lokal. Dengan konektivitas antara rencana dan tujuan pembangunan tersebut, maka dalam jangka Panjang GDPK Kabupaten Bangli memiliki tujuan peningkatan kondisi kependudukan yang berkualitas dalam mendukung Pembangunan Kependudukan Nasional yang berkelanjutan. Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kependudukan Kabupaten Bangli dalam jangka panjang, GDPK Kabupaten Bangli juga bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan Kabupaten Bangli untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang meliputi dukungan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta pembangunan sistem informasi dan data kependudukan yang akurat

dan terintegrasi.

Diharapkan dokumen GDPK Kabupaten Bangli dapat dijadikan landasan dan acuan bagi perumusan program atau kegiatan operasional dalam upaya mengatasi permasalahan kependudukan yang ada di Kabupaten Bangli serta mengintegrasikannya dengan dokumen pembangunan yang lainnya. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut maka disusunlah visi dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli sebagai modal untuk pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangli Tumbuh Seimbang dan Berkualitas Tahun 2045”

Visi *Grand design* pembangunan kependudukan Kabupaten Bangli sangat mendukung visi dari Kabupaten Bangli dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, & Keluarga Berencana Kabupaten Bangli. Dalam rangka mencapai visi tersebut, disusunlah misi dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli yaitu:

1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas;
2. Mewujudkan pembangunan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
3. Mewujudkan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
4. Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal dan internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi;
5. Mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Pembangunan kependudukan merupakan upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan.

4.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Isu strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi dalam wujud strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat menjawab sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja terutama di sektor pelayanan publik.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

1. Pembangunan Kependudukan yang menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama.
2. Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat, daerah maupun masyarakat.
3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan.

4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disamping dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Nasional, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli 2025-2045, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan lain yang telah ada dan masih berlaku seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Bali dan RPJMD Kabupaten Bangli, Rencana Tata Ruang serta Rencana Strategis Kabupaten Bangli dan lain sebagainya yang dipandang berhubungan dengan Pembangunan Kependudukan. Oleh karena itu, Keterkaitan Isu isu Strategis yang ada di Kabupaten Bangli dengan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan disusun dengan berpedoman pada cita-cita bangsa termasuk didalamnya cita-cita masyarakat Kabupaten Bangli dalam mencapai kesejahteraannya melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berlandaskan kepada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dilakukan melalui penyesuaian kebijakan yang meliputi dengan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta pembangunan manajemen data base dan informasi penduduk.

A. Isu Strategis terkait Pembangunan Keluarga

1. Strategi Dalam Upaya Membangun Keluarga Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa:
 - Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing- masing
 - Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama
 - Keluarga yang memelihara kerukunan antar umat beragama
2. Membangun Iklim Berkeluarga Berdasarkan Perkawinan yang sah
 - Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan

- Meningkatkan peran kelembagaan keluarga
 - Komitmen Pemerintah Indonesia yang mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan
 - Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara
 - Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat
3. Membangun keluarga berketahanan, sejatera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender
- Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal Strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
 - Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
 - Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik
 - Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga. Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial, ekonomi, dan lingkungan
4. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga
- Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga
 - Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka drop-out menurun.
 - Keluarga mempunyai perencanaan keuangan. Hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membeli rumah.

B. STRATEGI PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

1. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis
2. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan

daya tampung wilayah

3. Mengendalikan kuantitas penduduk dalam jangka panjang
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pinggiran perkotaan
5. Memperluas kesempatan kerja produktif bagi angkatan kerja baru
6. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
7. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
8. Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat

C. STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN

1. Pemantapan layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
2. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam memberikan layanan prima untuk mendukung hubungan sesama instansi pemerintah, hubungan kepada masyarakat dan hubungan dengan dunia bisnis, atau dikenal dengan *Government to Business*. Pada periode ini, ditargetkan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah daerah dan nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing *research*, *e-payment*, *e-commerce*, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
3. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Daerah terintegrasi Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

5.1 STRATEGI KEBIJAKAN

Kebijakan serta strategi dalam pembangunan kependudukan di wilayah Kabupaten Bangli disusun sebagai upaya untuk menggapai visi dan misi yang telah ditentukan dalam Kajian Akademik Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tahapan yang jelas dan penentuan prioritas yang akan menjadi bagian dari agenda pembangunan kependudukan jangka menengah. Skala prioritas dan langkah-langkah yang diambil disesuaikan dengan tingkat urgensi dari permasalahan yang hendak ditangani, namun tetap mempertimbangkan masalah lain yang juga penting. Maka dari itu, fokus prioritas di setiap tahapan bisa berbeda, tetapi seluruh proses harus berjalan secara berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya untuk mencapai tujuan dan cita-cita dalam Grand Design tersebut. Agar arah pembangunan tetap sesuai dan terintegrasi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang mendukung pencapaian visi tersebut. Strategi dan kebijakan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli yaitu:

1. Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Penduduk

Kebijakan

- Meningkatkan mutu layanan Keluarga Berencana (KB) serta kesehatan reproduksi.
- Memperkuat kegiatan advokasi dan penyebaran informasi, edukasi, dan komunikasi terkait kependudukan dan program KB.

Arah Kebijakan

Pengaturan Fertilitas

1. Mengatur kehamilan agar sesuai dengan rencana keluarga.

2. Membina partisipasi aktif masyarakat dalam program KB.
3. Mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga.
4. Mempromosikan penggunaan metode kontrasepsi yang aman dan efektif.
5. Memperluas akses terhadap layanan KB yang berkualitas.
6. Mendorong pendidikan dan peningkatan peran perempuan.
7. Mengajak lebih banyak pria untuk turut serta dalam program KB.

Penurunan Mortalitas

1. Menurunkan tingkat kematian ibu saat hamil.
2. Mengurangi angka kematian ibu dalam proses persalinan.
3. Menekan risiko kematian pada masa pasca persalinan.
4. Mengurangi angka kematian bayi dan balita.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Ekonomi Kebijakan

Memperluas akses serta meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendukung kemandirian.

Arah Kebijakan

Pendidikan

1. Mengembangkan kapasitas dan daya saing peserta didik.
2. Memperkuat layanan pendidikan formal dan non-formal dengan pendekatan *link and match*.
3. Menekan kesenjangan partisipasi pendidikan di antara kelompok usia wajib belajar.
4. Meningkatkan keterampilan literasi, pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas siswa.
5. Memperluas pelatihan kerja yang bersifat terpadu dan aplikatif.

Kesehatan

1. Mengurangi tingkat kematian masyarakat.
2. Meningkatkan harapan hidup penduduk.
3. Mengatasi masalah gizi buruk secara sistematis.

4. Menurunkan prevalensi stunting pada anak.
5. Meningkatkan kesadaran dan praktik hidup sehat di kalangan masyarakat.

Ekonomi

1. Meningkatkan kondisi ekonomi warga melalui perluasan lapangan kerja bagi angkatan kerja dan usia produktif.
2. Mengurangi ketimpangan sosial dan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Mendorong peningkatan penghasilan masyarakat dengan mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan.
4. Membangun perekonomian daerah yang berbasis kebutuhan (*on-demand economy*) dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

3. Pembinaan Dan Peningkatan Kemandirian Berkeluarga

Kebijakan

Mendorong pemberdayaan keluarga secara menyeluruh, baik dalam aspek ekonomi maupun dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal.

Arah Kebijakan

1. Melaksanakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah disertai dengan rencana aksi yang jelas.
2. Memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui pelibatan aktif dalam upaya pencegahan kekerasan dalam lingkup keluarga.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender.
4. Mengembangkan ketahanan keluarga untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.
5. Mendorong pembentukan keluarga yang sah secara hukum melalui pernikahan resmi.

4. Penataan Pengelolaan Mobilitas Penduduk

Kebijakan

Meningkatkan sistem pengelolaan serta pengarahan arus perpindahan penduduk agar lebih terorganisir dan terkendali.

Arah Kebijakan

1. Mendorong keterlibatan aktif perangkat desa dan kelurahan dalam memantau serta mengawasi penduduk yang datang ke wilayahnya.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif.
3. Menjalin koordinasi dengan camat dan kepala desa dalam rangka melakukan pendataan serta pemantauan terhadap kelompok penduduk rentan maupun pendatang.

5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Kebijakan

Mengoptimalkan kualitas sistem administrasi dan basis data kependudukan guna mendukung kebijakan berbasis data.

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana pendukung administrasi kependudukan.
2. Memperluas akses layanan administrasi secara daring (online) guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat.
3. Mengintegrasikan data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berbasis pada data penduduk yang akurat.

BAB VI

ROAD MAP PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya manusia. Karakteristik pembangunan, antara lain, dilaksanakan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas penduduk, melalui pewujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk yang terarah. Dalam kaitan itu, aspek penataan data dan informasi kependudukan merupakan hal penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

6.1 Kebijakan dan Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Road Map GDPK pengendalian kuantitas penduduk dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2045 masa akhir GDPK Kabupaten Bangli ini adalah kondisi dimana terciptanya pertumbuhan penduduk seimbang dengan kondisi stasioner. Faktor resiko dan peluang juga menjadi pilihan utama dalam penyusunan Road Map GDPK Kabupaten Bangli agar dapat menjadi basis perencanaan dan data bagi terciptanya target jangka pendek dan panjang pembangunan Kabupaten Bangli.

Berdasarkan tabel 6.1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menunjukkan tren menurun dari 0,628% (2025) menjadi 0,547% (2045) yang artinya untuk keberhasilan dalam memperlambat pertumbuhan penduduk menunjukkan adanya pengendalian kelahiran yang harus efektif. *Crude Birth Rate* (CBR / Angka Kelahiran Kasar) memiliki tren turun signifikan dari 10,964 per 1.000 penduduk (2025) menjadi 6,471 (2045) hal ini mengindikasikan keberhasilan program keluarga berencana dan pergeseran pola reproduksi masyarakat. *General Fertility Rate* (GFR / Angka Fertilitas Umum) memiliki tren yang relatif stabil di kisaran 45–50 kelahiran per 1.000 wanita usia subur artinya stabilitas ini menunjukkan bahwa kelahiran terjadi pada kelompok usia yang tepat, meski jumlah total

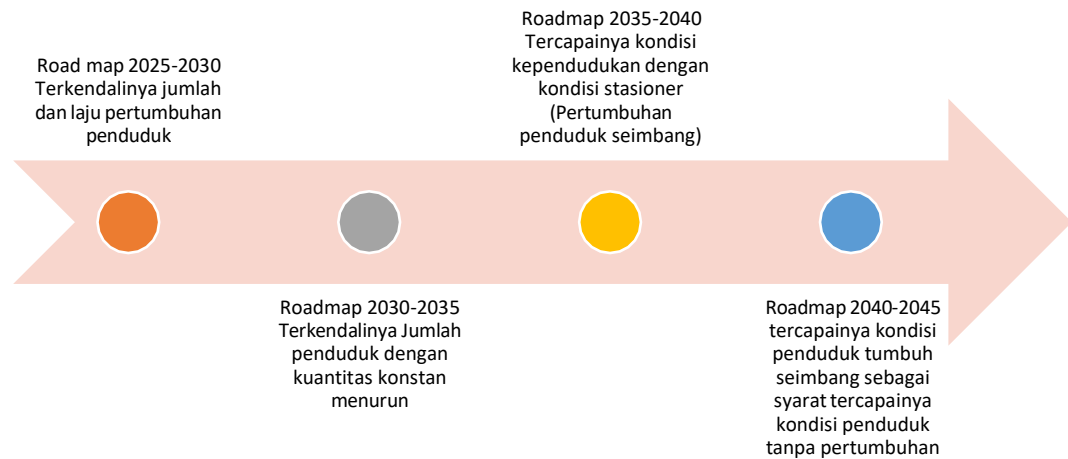
kelahiran berkurang. *Dependency Ratio* (Rasio Ketergantungan) dalam proyeksi ini memiliki tren meningkat 32,14% (2025) menjadi 37,49% (2045), hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam pengendalian kuantitas tidak hanya dari sisi kelahiran, tetapi juga dari sisi jumlah penduduk nonproduktif yang semakin besar, terutama lansia. Jumlah Penduduk Total memiliki tren yang bertambah dari 261.020 jiwa (2025) menjadi 292.502 jiwa (2045) dimana pertumbuhan absolut tetap ada meskipun laju pertumbuhan penduduk menurun, sehingga kebijakan pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan. Jadi yang menjadi indikator positif adalah laju pertumbuhan penduduk yang menurun, CBR yang terus menurun, dan GFR yang terkendali. Sedangkan yang menjadi indikator yang perlu diperhatikan adalah *Dependency Ratio* yang naik dan total penduduk yang terus bertambah.

Tabel 6.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Indikator	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	261.020	268.890	276.761	284.631	292.502
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,628	0,5959	0,5787	0,5624	0,5470
Ratio Ketergantungan/ Dependency Ratio (DR)	32,14%	33,53%	34,88%	36,20%	37,49%
Angka Kelahiran Kasar/ Crude Birth Rate (CBR)	10,964	9,202	7,961	7,087	6,471
Angka Fertilitas Umum/ General Fertility Rate (GFR)	45,91	49,29	49,88	49,98	50
Angka Kelahiran Kelompok Umur/ Age Specific Fertility Rate (ASFR)					
Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Angka Kematian Bayi/ Infant mortality rate (IMR)	12,933	12,148	11,362	10,576	9,790
Angka Kematian Ibu/ Maternal Mortality Rate (MMR)	132,7	117	101,3	85,7	70

Sumber : Hasil Analisa, 2025

Untuk itu, Road Map ini berjalan dengan sistematis apabila evaluasi sasaran pada periode lima tahunan, kebijakan dan strategi, dan program dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan dengan target sebagai berikut:



Gambar 6.1 Road Map Sasaran Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Bangli 2025-2045

Adapun indikator pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Jumlah kebijakan (peraturan daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas penduduk
3. Rata-rata jumlah anak per keluarga
4. Rasio akseptor KB
5. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
6. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Dalam jangka panjang kondisi yang ingin dicapai adalah tercapainya pertumbuhan penduduk yang stabil dan tidak begitu besar. Dalam mencapai hal ini perlu untuk menyeimbangkan antara jumlah kelahiran bayi dengan jumlah kematian. Kondisi yang ingin dicapai ini disebut juga kondisi yang stasioner. Melalui kondisi ini diharapkan akan terjadi penurunan rasio ketergantungan yang

mana jumlah penduduk yang produktif akan lebih besar dari pada penduduk non produktif sehingga dapat memberikan kontribusi pada perekonomian. Namun kondisi itu bisa menjadi masalah jika tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu, pengendalian kuantitas penduduk dalam jangka panjang juga diperlukan untuk memastikan bahwa meningkatnya pertumbuhan penduduk juga diikuti dengan distribusi dan penyediaan sumber daya yang memadai dalam mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas jumlah penduduk dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bangli.

6.2 Kebijakan dan Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk dalam GDPK Kabupaten Bangli menitikberatkan pada pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Road Map peningkatan kualitas penduduk merupakan ukuran dan sasaran baik kuantitatif dan kualitatif dalam mencapai peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Bangli sampai pada periode akhir GDPK tahun 2045. Road Map peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Bangli berfokus pada Dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sasaran Road Map peningkatan dalam jangka panjang akan menciptakan penyelarasan antara kuantitas penduduk yang seimbang dengan kualitas penduduk yang ada, terutama dalam menghadapi bonus demografi.

Secara keseluruhan tabel 6.2 menunjukkan perbaikan yang konsisten pada indikator pendidikan (lama sekolah meningkat, APS hampir universal untuk usia lebih muda), kemajuan kesehatan pada beberapa indikator (harapan hidup meningkat, balita pendek mengalami penurunan), dan pertumbuhan ekonomi yang kuat tetapi stabil (~6% per tahun), yang tercermin pada IPM naik dari 73 menjadi 83,42 pada 2045. Kombinasi ini menunjukkan pola pembangunan manusia yang positif dengan kenaikan modal manusia (pendidikan dan kesehatan) berkontribusi pada kenaikan pendapatan per kapita dan IPM.

Tabel 6.2 Road Map Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Bangli

Indikator	2025	2030	2035	2040	2045
Pendidikan					

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	7,757	8,362	8,967	9,572	10,177
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun (%)	99,77	99,88	99,94	99,97	99,98
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun (%)	98,57	99,49	99,82	99,94	99,98
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun (%)	75,89	76,44	76,98	77,51	78,03
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar / sederajat (%)	103,58	103,51	103,7	103,55	103,49
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama / Sederajat (%)	82,62	82,71	82,66	82,8	82,86
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas / sederajat (%)	95,47	95,55	95,57	95,49	95,57
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	99,12	99,16	99,16	99,31	99,4
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS (%)	76,41	76,41	76,37	76,55	76,45
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA (%)	67,1	67,21	67	66,89	67,18
Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)	32,59	34,54	36,64	38,89	41,30
Kesehatan					
Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki (Tahun)	71,97	72,74	73,52	74,29	75,07
Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan (Tahun)	77,11	78,73	80,36	81,98	83,61
Jumlah Balita Pendek (TB/U) usia 0-59 bulan yang ditimbang	583	578	573	568	563
Perekonomian					
Persentase Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,23	6,05	6,01	6,03	6,02
IPM	73	75,6	78,21	80,81	83,42

Sumber : Hasil Analisa, 2025

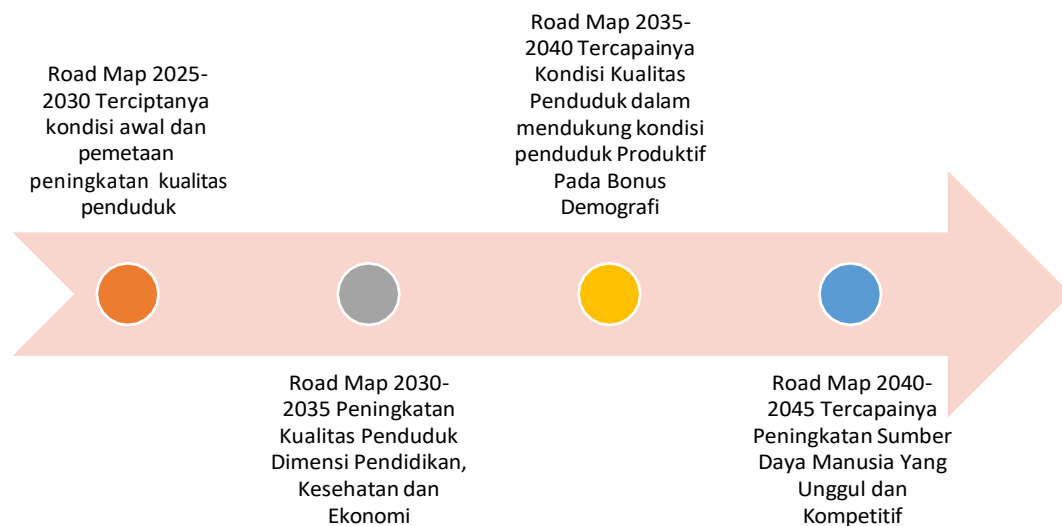
Pertumbuhan jumlah penduduk dan bonus demografi yang terjadi harus diikuti dengan pengembangan kualitas penduduk sehingga bonus demografi tersebut bisa memberikan manfaat yang besar bagi Kabupaten Bangli. Dalam hal itu, pengembangan kualitas penduduk dapat dilihat peningkatan angka partisipasi sekolah di kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun, 16 – 18 tahun dan 19 – 24 tahun. Selain itu, pada aspek pendidikan yang lain, peningkatan kualitas penduduk juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 7,757 (2025) menjadi 10,177 (2045) artinya lebih banyak penduduk menyelesaikan jenjang pendidikan dasar/menengah.

APS 7–12 dan 13–15 mendekati 100% yaitu 99,77–99,98% dan 98,57–99,98% artinya hampir semua anak usia dasar dan *lower-secondary* bersekolah dan pencapaian universal pada jenjang awal. APS 16–18 relatif rendah dan lambat naik dari 75,89% → 78,03% hal ini masih ada gap pada partisipasi *upper secondary* (SMA/SMK), berpotensi karena faktor ekonomi keluarga, kebutuhan bekerja, akses atau biaya pendidikan menengah atas, atau ketidakcocokan kurikulum dengan kebutuhan kerja. APK (SD) >100% (103,5%) menunjukkan adanya *over-enrolment* relatif (siswa di luar usia reguler ikut tercatat) bukan langsung negatif, tetapi perlu ditelaah adanya pendaftaran anak usia kurang/tua, repetisi, migrasi pelajar, atau data administrasi.

APK SMP & SMA (sekitar 82–95%) memberi sinyal capaian akses, tetapi APM (partisipasi murni) menunjukkan perbedaan dimana APM SD $\approx$ 99% (nyaris sempurna — positif) dan APM SMP $\approx$ 76%, APM SMA $\approx$ 67% menunjukkan masalah pada penyelesaian dan transisi ke jenjang lebih tinggi. Sehingga kebijakan yang perlu diberikan adalah tingkatkan akses dan retensi ke SMP & SMA (beasiswa, subsidi biaya, program insentif keluarga miskin), perluas vokasi dan pembelajaran fleksibel untuk remaja 16–18 tahun agar lebih relevan ke pasar kerja, Perbaiki kualitas pembelajaran (guru, kurikulum, asesmen) untuk menaikkan *learning outcomes* seiring kenaikan lama sekolah.

Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) naik, pada laki-laki: 71,97 menjadi 75,07 dan perempuan: 77,11 menjadi 83,61. Perbaikan layanan kesehatan primer, gizi, sanitasi, dan penurunan mortalitas anak. Terdapat juga jarak (gender gap) melebar (perempuan hidup lebih lama) pola umum global. Jumlah Balita Pendek turun perlahan: 583 menjadi 563 (0–59 bln). Perbaikan gizi/layanan IBU-ANAK dan intervensi gizi lebih intensif untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting. Pada aspek kesehatan, kondisi yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan itu ditandai dengan semakin menurunnya angka kematian bayi. Ditargetkan dalam 25 tahun mendatang bayi yang menderita stunting juga akan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Bahkan, kondisi yang ingin dicapai tidak ada lagi bayi gizi buruk di

Kabupaten Bangli. Kondisi yang ingin dicapai pada angka hidup sejalan dengan perbaikan derajat kesehatan masyarakat secara umum.



Gambar 6.3 Road Map Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Bangli 2025-2045

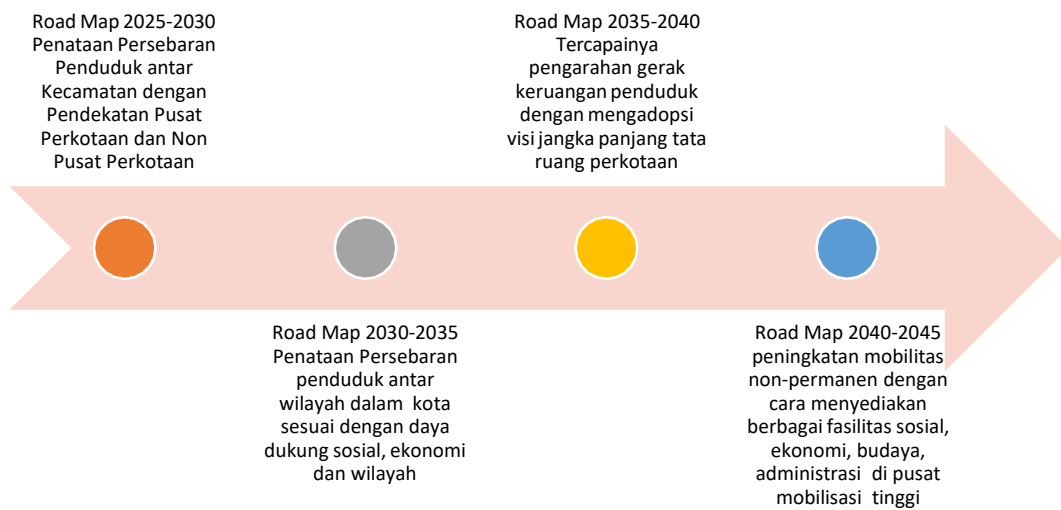
Dalam aspek ekonomi, pada tahun 2045 mendatang, kondisi yang diharapkan tercapai adalah Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangli dan pendapatan per kapita penduduk meningkat 50 persen. Hal ini sangat mungkin dicapai bila mengingat peluang Kabupaten Bangli yang berada pada wilayah strategis yang menghubungkan pusat-pusat industri pariwisata dan pertanian di Bali. Dalam hal angka atau tingkat kemiskinan dan rasio gini, kondisi yang ingin dicapai pada 2045 adalah terjadi penurunan pada kedua variabel ini dimana untuk rasio gini diharapkan berada pada angka 0,25 dan tingkat kemiskinan di kisaran 1,00 persen. Untuk tingkat pengangguran diharapkan akan terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,00 persen.

6.3 Kebijakan dan Roadmap Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bangli

Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dalam GDPK Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045 menyelaraskan dengan perkembangan pembangunan regional dan amanat UU Nomor 52 Tahun 2009 pada pasal 33 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dan juga daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Mobilitas dalam konteks dinamika pembangunan kependudukan Kabupaten Bangli adalah resiko *sub-urban shocking*, dimana kondisi ini terjadi karena pembangunan dan dinamika perkotaan tidak dapat menampung perkembangan baik dari sisi jumlah penduduk dan kualitas penduduk Kabupaten Bangli dalam jangka panjang. Pasal 16 menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi/kab/kota pengumpulan dan analisis data-data mobilitas atau persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem database dan penertiban pelaksanaan pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai atau kebijakan dan pengelolaan pengarahannya mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahannya mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan kewilayahan.

Untuk itu road map penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dalam GDPK Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut;

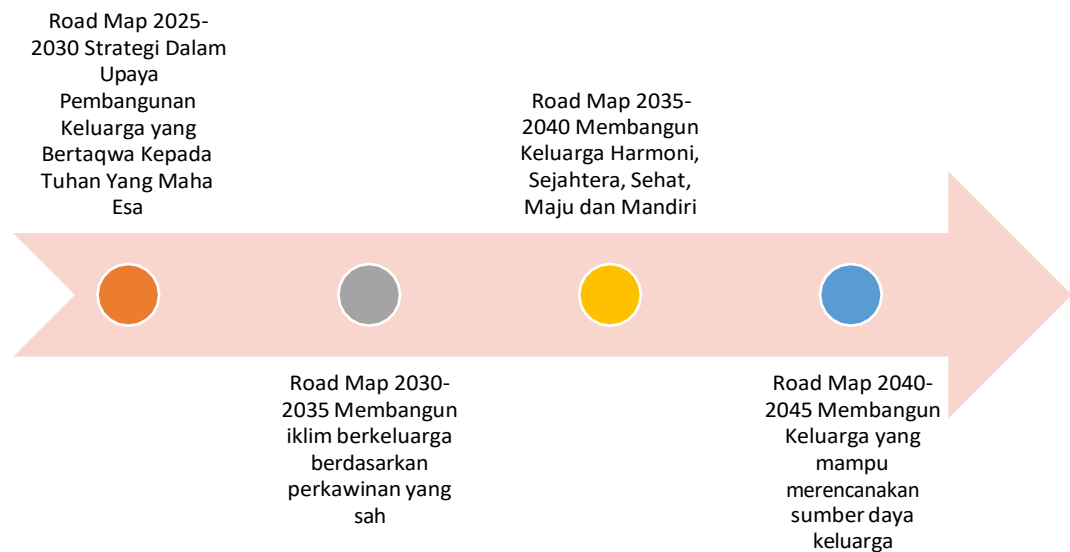


Gambar 6.3 Road Map Sasaran Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bangli 2025-2045

Dalam hal persebaran dan mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terciptanya persebaran penduduk yang merata sesuai daya dukung dan daya tampung di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangli dan menurunnya angka migrasi netto antar Kabupaten/Kota. Dalam rangka untuk mewujudkan persebaran penduduk yang baik itu, membuat fasilitas-fasilitas publik mudah untuk dijangkau oleh seluruh penduduk Kabupaten Bangli menjadi kebijakan yang baik untuk diterapkan. Berdasarkan hasil proyeksi, kepadatan penduduk semakin meningkat di seluruh Kecamatan Kabupaten Bangli.

6.4 Kebijakan dan Roadmap Pembangunan Keluarga

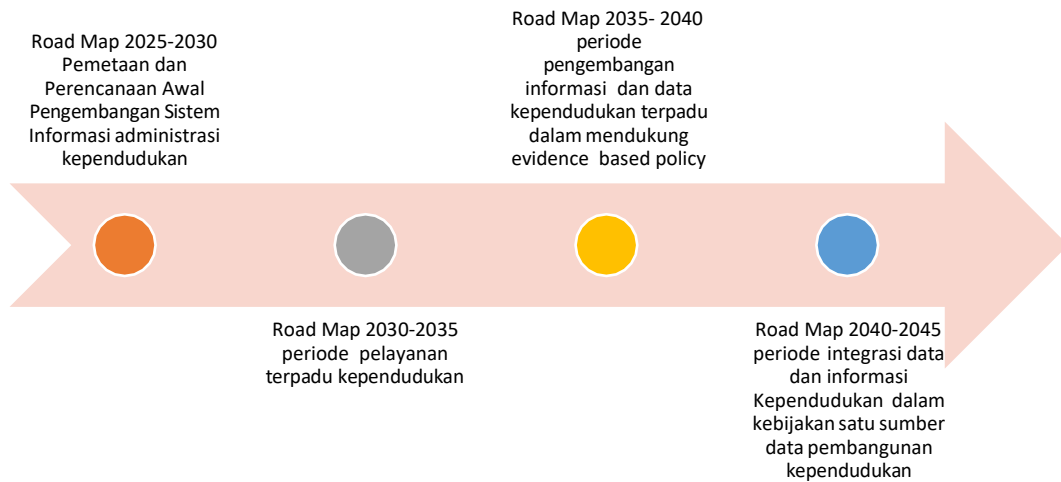
Kebijakan pembangunan keluarga dalam GDPK Kabupaten Bangli dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapun road map sasaran untuk setiap periode sampai pada tahun 2045 dijelaskan sebagai berikut;



Gambar 6.4 Road Map Sasaran Pembangunan Keluarga Kabupaten Bangli

6.5 Kebijakan dan Roadmap Pembangunan Manajemen Database dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya kebijakan dan roadmap pembangunan manajemen database dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan database dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari penyusunan kebijakan berdasarkan pada fakta dan data (*evidence based policy making*). Adapun tahapannya dapat dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut;



Gambar 6.5 Road Map Sasaran Kebijakan Pembangunan Sistem Informasi dan Data Administrasi Kependudukan Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045

Berdasarkan road map kebijakan pembangunan kependudukan yang telah disusun, adapun operasionalisasi tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel.

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Tahun			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan besar	Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota				
			Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota				
			Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbn) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D Serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota				
			Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota				
			Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbn) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)				
		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal				
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan				

			Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (Kat)				
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggung Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial				
			Rehabilitasi Sosial Penyanggung Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial				
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan				

			Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
			Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
			Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus				
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				

			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/Petugas Lapangan Kb (Pkb/Plkb)				
			Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota				
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga				
			Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga				
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (Kat)				
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas				

			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial				
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial				
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)				
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten/Kota				
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)				
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
			Penataan Pendaftaran Penduduk				
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil				
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
			Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
		Program Pengelolaan	Pengumpulan Data Kependudukan Dan				

		Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan				
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan				
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				

Sumber : Hasil Rencana, 2025

BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Fokus utama di Kabupaten Bangli ke depan adalah mengoptimalkan bonus demografi. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi kunci utama dalam mencapai potensi tersebut, melalui upaya menciptakan generasi yang sehat secara fisik dan mental, cerdas, mandiri, beriman, berbudi pekerti luhur, dan memiliki etos kerja kuat. Oleh karena itu, perhatian difokuskan pada peningkatan pendidikan, akses kesehatan, dan perbaikan kondisi ekonomi warga. Selain itu, jumlah penduduk saat ini masih cukup tinggi. Idealnya, penduduk tumbuh menuju stabilitas jumlah yang tidak berlebihan. Melalui pembangunan keluarga yang berkualitas, diharapkan tercipta keluarga sejahtera dan tangguh, yang mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal.

Distribusi penduduk saat ini belum merata. Targetnya adalah persebaran yang sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan melalui penataan mobilitas penduduk yang lebih proporsional. Sistem data kependudukan saat ini belum optimal—terhambat oleh regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan pembagian kewenangan pascapemberlakuan otonomi daerah. Untuk itu, perlu dibangun sistem survei dan pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah seperti swasta serta LSM. Kebijakan harus diarahkan untuk membentuk database kependudukan yang dapat menghasilkan data akurat, andal, dan bisa segera digunakan dalam pengambilan keputusan.

Permasalahan kependudukan yang semakin kompleks memerlukan komitmen pemerintah daerah yang kuat. Integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan regional harus diutamakan. Strategi awal yang diperlukan adalah *population mainstreaming*, yakni penerapan prinsip pembangunan berpusat pada masyarakat (*people-centered development*) dalam setiap kebijakan pembangunan. Kualitas penduduk mencakup aspek fisik dan non-fisik seperti tingkat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, status sosial, kemandirian, kecerdasan, dan ketaqwaan (UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5).

Tujuan pembangunan kualitas penduduk adalah mewujudkan manusia sehat, cerdas, mandiri, beriman, berbudi pekerti luhur, dan berdedikasi kerja, melalui peningkatan pendidikan, akses kesehatan, dan kapasitas ekonomi.

Kolaborasi antara program pengendalian jumlah penduduk dan program kualitas penduduk perlu ditingkatkan. Jalinan kebijakan dan jaringan program antar pihak (pusat, provinsi, kabupaten) sangat penting untuk mewujudkan tata kelola kependudukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Permasalahan kependudukan di Bangli tidak bisa dipisahkan dari isu nasional seperti pendidikan, kesehatan, pemerataan ekonomi, dan distribusi penduduk. Penduduk adalah modal utama pembangunan berkelanjutan. Grand Design Pembangunan Kependudukan sesuai Perpres No. 153 Tahun 2014 menjadi acuan menyeluruh untuk tata kelola penduduk di Bangli.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli mencakup 5 pilar pembangunan di bidang kependudukan yaitu; Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga Berkualitas, Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan, yang menjadi bagian integral dari Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar sehingga diperlukan koordinasi serta sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Rekomendasi kegiatan program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli secara umum dapat dibagi per pilar sebagai berikut:

Pilar & Rekomendasi Program Prioritas Grand Design Kependudukan Bangli

Pilar	Penjelasan Singkat
a. Pengelolaan Kuantitas Penduduk	Memonitor proyeksi pertumbuhan dan dependency ratio; memperkuat program KB untuk menekan kelahiran; memanfaatkan bonus demografi melalui peningkatan pendidikan dan kesiapan kerja.
b. Kualitas Penduduk	Prioritas pada pendidikan dan pelayanan kesehatan: kurikulum, tenaga pendidik, dan pemberdayaan masyarakat.
c. Persebaran & Mobilitas	Penyusunan Grand Design lokal; pengembangan infrastruktur transportasi; sistem database mobilitas; laporan migrasi pekerja untuk mendukung pemerataan.

d. Keluarga Berkualitas	Penyusunan Grand Design lokal; pengembangan infrastruktur transportasi; sistem database mobilitas; laporan migrasi pekerja untuk mendukung pemerataan.
e. Administrasi & Database Kependudukan	Pengelolaan data kependudukan, penerbitan akta lahir, penguatan data desa, serta pengembangan sistem informasi kependudukan yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli. (2024). <https://banglikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/pdrb-menurut-lapangan-usaha--milyar-rupiah-.html>. Bangli: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli. (2024). *Bangli dalam Angka 2024*. Bangli: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli. (2024). *Buku Data Agregat Semester I Tahun 2024, Semester II Tahun 2021-2023*. Bangli: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli. (2024). <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE0IzI=/proyeksi-penduduk-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa-.h>. Bangli: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli. (2024). <https://bali.bps.go.id/indicator/26/401/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali-umur-harapan-hidup-hasil-long-form-sp20>. Bangli: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli.
- BKKBN. (2020). *Grand Design Pembangunan Kependudukan 2010–2035*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. (2025). <https://drive.google.com/drive/folders/1ooChDCjlZNva1uBTNohJ-PL9u0vOyXqd>. Bangli: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2000). *Organizations: Behavior, Structure, Processes (10th ed.)*. Boston: McGraw-Hill.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Bangli Tahun 2021-2026*. Bangli: Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development (11th ed.)*. Boston: Addison-Wesley.
- UNFPA. (2019). *The Power of Choice: Reproductive Rights and the Demographic Transition*. New York: United Nations Population Fund.
- Weeks, J. R. (2011). *Population: An Introduction to Concepts and Issues (11th ed.)*. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing;
- b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design pembangunan kependudukan, bahwa Kabupaten Bangli perlu menetapkan peraturan bupati tentang grand design kependudukan Kabupaten Bangli tahun 2025- 2045;
- c.bahwa guna memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk daerah provinsi,

perlu dilakukan pengaturan Pembangunan Kependudukan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomo 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);
8. Peraturan presiden nomor 153 tahun 2014 tentang *grand design* pembangunan kependudukan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025-2045

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
7. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
8. Diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
9. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam *road map* Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
10. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
14. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam

aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
18. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
19. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
21. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
22. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan

daya tampung lingkungan.

23. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
24. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
25. Roadmap merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* selama 5 tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat *living document* dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada masanya.

BAB II

VISI DAN MISI KEPENDUDUKAN

Bagian
Kesatu
Visi
Pasal 2

Visi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangli Tumbuh Seimbang dan Berkualitas Tahun 2045.

Bagian
Kedua
Misi
Pasal 3

Misi Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bangli adalah

- a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas;
- b. Mewujudkan pembangunan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
- c. Mewujudkan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- d. Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal dan

- internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi;
- e. Mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga
Strategi Pembangunan Kependudukan
Pasal 4

- (1) Strategi Pembangunan Keluarga
- a. Strategi Dalam Upaya Membangun Keluarga Yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa:
1. Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing;
 2. Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama;
 3. Keluarga yang memelihara kerukunan antar umat beragama.
- b. Membangun Iklim Berkeluarga Berdasarkan Perkawinan yang sah:
1. Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan;
 2. Meningkatkan peran kelembagaan keluarga;
 3. Komitmen Pemerintah Indonesia yang mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan;
 4. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara;
 5. Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat.
- c. Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender:
1. Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal Strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 2. Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan);
 3. Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter

baik;

4. Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga. Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

d. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga:

1. Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga;
2. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka *drop-out* menurun;
3. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan. Hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membeli rumah.

(2) Strategi Pengarahan Mobilitas Penduduk

- a. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis;
- b. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung wilayah;
- c. Mengendalikan kuantitas penduduk dalam jangka panjang;
- d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pinggiran perkotaan;
- e. Memperluas kesempatan kerja produktif bagi angkatan kerja baru;
- f. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran;
- g. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia;
- h. Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

(3) Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan

- a. Pemantapan layanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam memberikan layanan prima untuk mendukung hubungan sesama instansi pemerintah, hubungan kepada masyarakat dan hubungan dengan dunia bisnis, atau dikenal dengan *Government to Business*. Pada periode ini, ditargetkan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi

perencanaan pemerintah daerah dan nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan *marketing research*, *e-payment*, *e-commerce*, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.

- c. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Daerah terintegrasi Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.

BAB III GDPK KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025-2045 Pasal 5

Grand Design Pembangunan Keluarga Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 6

Grand Design Pembangunan Keluarga Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pasal 5 di susun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab 1 : Pendahuluan
- Bab 2 : Analisa Situasi Kependudukan Dan Capaian Pembangunan
- Bab 3 :Proyeksi Penduduk Dan Situasi Ideal Kependudukan
- Bab 4 : Visi Dan Misi Serta Strategi Kependudukan
- Bab 5 :Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kependudukan
- Bab 6 : Road Map Kependudukan
- Bab 7 : Penutup

BAB IV TIM KORDINASI PELAKSANAAN GDPK Pasal 7

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Grand Design pembangunan kependudukan Di Kabupaten Bangli di

Bentuk Tim Kordinasi:

- (2) Tim kordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas mengkordinasikan dan menyingkronkan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan *Grand Design* pembangunan kependudukan.
- (3) Dalam mengkordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program *Grand Design* pembangunan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim kordinasi memperhatikan kebijakan dan Program *Grand Design* pembangunan kependudukan nasional dan provinsi serta arahan tim koordinasi pelaksanaan *Grand Design* pembangunan kependudukan Provinsi .

Pasal 8

Tim kordinasi pelaksanaan *Grand Design* pembangunan kependudukan Kabupaten Bangli dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas penduduk;
 - c. Kelompok Kerja Bidang pembangunan keluarga;
 - d. Kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk;
 - e. Kelompok Kerja Bidang kelembagaan dan pembangunan database kependudukan.
- (3) Keanggotaan tim kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah dari OPD Terkait dan Lembaga non pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di
Bangli pada
tanggal
.....
BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTHA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGLI,
ttd

.....
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN